



global witness

UANG KEAMANAN
Pertambangan Freeport dan
aparatus keamanan Indonesia

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia untuk laporan Global Witness
“Paying for Protection: The Freeport mine and the Indonesian security forces”
yang dikeluarkan pada bulan Juli 2005

Daftar Isi

“Uang Keamanan”: sebuah ikhtisar 3

Indonesia pada Jaman Soeharto 7

Freeport di Papua 8

“Tidak benar dan tidak relevan” versus “bantahan yang sangat berlebihan”:
Freeport dan para investor 11

“Tentara Freeport” 14

Boks: Serangan bulan Agustus 2002 15

Boks: Apa yang dikatakan Freeport McMoRan ... dan apa yang tidak dikatakan 18

Uang makan Jendral Simbolon 19

Boks: Mahidin Simbolon di Timor Timur dan Papua 20

Membayar untuk apa sebenarnya? 23

Dari individu ke institusi? 25

Membangun masyarakat yang lebih baik 25

Membayar pengerahan polisi? 25

Boks: Apa yang dikatakan Rio Tinto ...dan apa yang tidak dikatakan 26

Kesimpulan 27

Boks: Transparansi pembayaran yang dilakukan perusahaan di Indonesia 29

Referensi 31

Global Witness ingin mengucapkan terima kasih kepada Yayasan HAK, sebuah organisasi HAM di Timor Leste, atas bantuannya di sebagian laporan ini.

Global Witness menginvestigasi dan mengekspos peran eksploitasi sumber alam dalam pendanaan konflik dan korupsi. Dengan menggunakan bukti-bukti dokumentasi yang didapatkan dari investigasi kami di lapangan, baik secara terbuka maupun secara rahasia, kami menyebutkan nama-nama dan mempermalukan mereka yang mengeksploitasi kekacauan dan kegagalan negara. Kami melobi hingga ke tingkat yang paling tinggi untuk sebuah pendekatan internasional yang terpadu, supaya sumber alam dikelola secara transparan dan adil. Kami tidak memiliki afiliasi politik dan tidak memihak, dimanapun kami bekerja. Global Witness pernah dinominasikan untuk hadiah Nobel Perdamaian tahun 2003 untuk pekerjaan kami dalam menghindari perdagangan intan berlian yang berasal dari daerah konflik.

“Uang Keamanan”: Sebuah Ikhtisar

Global Witness telah lama prihatin atas kurangnya transparansi mengenai pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang dan minyak kepada beberapa negara di dunia, karena kurangnya transparansi dapat menyembunyikan korupsi maupun masalah lain dalam proses dan sistem pemerintahan.

Transparansi sangat dibutuhkan apalagi di daerah konflik, dimana ada kemungkinan bahwa aparat keamanan akan meminta pembayaran dari perusahaan ekstraktif untuk melindungi mereka dari pemberontak atau masyarakat setempat yang tidak senang. Norma hukum biasanya sangat lemah atau bahkan tak ada di daerah-daerah konflik, dan pada banyak kasus, para aparat keamanan yang sama, kemungkinan korup atau terlibat pelanggaran hak azasi manusia. Akibatnya, dapat timbul kecurigaan bahwa sebuah perusahaan terlibat korupsi atau pelanggaran hak azasi manusia, atau diperas oleh pihak-pihak tertentu kedalam konflik. Tanpa transparansi yang penuh, tidak mungkin bagi masyarakat, termasuk bagi para pemegang saham perusahaan yang bersangkutan, untuk dapat menilai apakah perusahaan bertindak sesuai hukum dan etika.

Sebuah perusahaan tambang terkemuka yang telah menghadapi bermacam-macam kontroversi karena hubungannya dengan aparat keamanan negara di daerah konflik yaitu Freeport McMoran Copper & Gold Inc. Perusahaan Amerika ini menguasai tambang raksasa di Indonesia yang memiliki kandungan emas terbesar dan tembaga nomor dua terbesar di dunia. Tambang Grasberg di Papua yang dulunya dikenal sebagai Irian Jaya, yang terletak di bagian Timur Indonesia dikelola oleh anak perusahaan lokal yaitu PT Freeport Indonesia dimana 90.64% sahamnya dikuasai oleh Freeport McMoran, dan 9.36% dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Freeport Indonesia memiliki kongsi dengan Rio Tinto, perusahaan tambang raksasa dunia, yang memiliki saham minoritas di Freeport McMoran Copper & Gold Inc hingga tahun 2004. Masyarakat Indonesia, pemerhati dan karyawan perusahaan pada umumnya menyebut induk perusahaan di Amerika dan anak perusahaan setempat sebagai Freeport.

Operasi tambang Freeport telah dijaga oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejak tahun 1970-an, yang mana TNI selama itu berupaya untuk memberantas para pemberontak Papua yang menginginkan kemerdekaan. TNI memiliki sejarah kekejaman terhadap rakyat sipil dan diketahui terlibat korupsi dan kegiatan bisnis ilegal, seperti juga Polisi Republik Indonesia (Polri). Karena alasan ini, sudah lama kontroversi merebak akibat hubungan dekat perusahaan tambang ini dengan aparat keamanan negara yang menjaganya.

Kontroversi ini meningkat setelah tanggal 31 Agustus 2002, yaitu ketika beberapa orang bersenjata secara tiba-tiba menyerang sekelompok guru yang bekerja pada Freeport Indonesia dan membunuh dua orang warganegara Amerika Serikat dan seorang warganegara Indonesia, dan melukai sebelas orang lainnya. Seorang warga Papua, Anthonius Wamang, telah didakwa oleh pengadilan Amerika Serikat atas keterlibatannya dalam pembunuhan tersebut.¹

Wamang, yang saat ini sedang bersembunyi, pernah menyatakan bahwa ia adalah pemberontak Papua dan partner bisnis prajurit TNI.² Walaupun pejabat Indonesia telah menyatakan bahwa pemberontak Papua sebagai pelakunya, kasus ini masih belum terpecahkan, dan berbagai pemerhati, termasuk juga anggota Polri dan pejabat Amerika Serikat (AS), masih curiga bahwa beberapa anggota TNI kemungkinan terlibat. (lihat boks: Serangan Agustus 2002, halaman 15).

Freeport, para investor dan TNI

Setelah peristiwa pembunuhan Agustus 2002, dua Yayasan Pensiunan yang dimiliki oleh pegawai Kota New York yang memiliki saham di Freeport McMoran meminta perusahaan untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai hubungan mereka dengan TNI. Sudah lama diketahui bahwa Freeport McMoran membayar TNI dan Polri untuk melindungi tambang, namun hampir tak ada informasi yang dikeluarkan mengenai pembayaran ini. Yayasan Pensiunan Kota New York menyebutkan sebuah laporan media yang memberi kesan bahwa serangan Agustus 2002 merupakan usaha anggota TNI untuk memeras lebih banyak uang dari Freeport dan mengatakan: “Gambaran pembayaran ini adalah sebuah pemerasan menimbulkan kekhawatiran apakah pembayaran ini melanggar Foreign Corrupt Practices Act” (“The characterization of these payments as extortion raises the additional concern of whether such payments violate the Foreign Corrupt Practices Act”).³ [Foreign Corrupt Practices Act atau Undang-Undang Praktek Korupsi Luar Negri adalah undang-undang Amerika Serikat yang mengatur pembayaran dari perusahaan-perusahaan AS kepada pejabat negara asing.]

Yayasan Pensiunan mengutarakan kekhawatiran mereka bahwa: “perusahaan transnasional yang beroperasi di negara-negara yang memiliki pemerintahan yang represif, konflik etnis, norma hukum yang lemah, korupsi yang merajalela, atau tenaga kerja dan standard lingkungan hidup yang buruk, menghadapi resiko yang cukup serius terhadap reputasi maupun nilai saham perusahaan, jika mereka dilihat bertanggung jawab atau terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)”.⁴

4 *Uang Keamanan*

Dalam serangkaian surat terhadap penegak hukum AS, Freeport McMoRan menyangkal tuduhan adanya pemerasan atau pembayaran yang korup, dan menganggap pandangan Yayasan Pensiun kota New York sebagai hal yang “tidak relevan dan tidak benar” (“irrelevant and false”)⁵, sementara Yayasan Pensiunan mengkritik sangkalan Freeport McMoRan “yang sangat berlebihan” (“almost hysterical denial”) atas pelanggaran apapun.⁶ Freeport McMoRan tidak melaporkan tentang hubungannya dengan TNI kepada para pemegang sahamnya, seperti yang diminta oleh Yayasan Pensiunan. Namun, perusahaan memang telah mengambil langkah ke arah transparansi yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yaitu pada awal tahun 2003 ketika mereka mengungkapkan bahwa anak perusahaannya di Indonesia telah membayar sebesar 4,7 juta dollar AS di tahun 2001 dan 5,6 juta dollar AS di tahun 2002 sebagai “biaya bantuan untuk jasa keamanan yang diberikan pemerintah (“support costs for government-provided security”).⁷

Freeport McMoRan menyatakan bahwa biaya ini dipakai untuk biaya infrastruktur, makanan, perjalanan, administrasi, dan program bantuan masyarakat yang dikelola oleh TNI dan Polri.⁸ Penyingkapan yang sama dilakukan kembali sejak bulan Maret 2003 di dalam keterangan publik Freeport McMoRan kepada US Securities and Exchange Commission (SEC), yang mengatur pemberian informasi oleh perusahaan terhadap investor [SEC adalah badan resmi di AS yang tugasnya memastikan bahwa perusahaan mempublikasikan informasi tertentu supaya para investor dapat mengambil keputusan investasi berdasarkan informasi yang cukup mengenai perusahaan yang bersangkutan].

Dengan memperlihatkan pembayaran ini dalam keterangannya kepada SEC, Freeport McMoRan telah menyetujui bahwa hal itu penting bagi investor – yaitu bahwa para investor memerlukan informasi mengenai pos-pos pembayaran untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang manajemen perusahaan, posisi keuangan dan prospek bisnis perusahaan. Namun Yayasan Pensiunan Kota New York belum puas, dan terus menyuarakan kekhawatiran mereka di tahun 2004 dan 2005 atas hubungan perusahaan dengan TNI dan resiko keuangan maupun resiko reputasi yang dapat menimpa perusahaan dari hubungan tersebut.

Informasi Baru Yang Menggelisahkan

Global Witness dapat memperlihatkan bahwa Yayasan Pensiunan memang perlu untuk tetap bertanya. Pengumuman dari Freeport McMoRan hingga hari ini tidak mengikutsertakan informasi detail yang mengkhawatirkan mengenai hubungan anak perusahaannya dengan TNI. Yang lebih merisaukan, Global Witness mempelajari bahwa serangkaian pembayaran

berjumlah 247,705 dollar AS kelihatannya telah dilakukan oleh Freeport Indonesia kepada seorang jendral Indonesia bernama Mahidin Simbolon.

Kecuali dua buah pembayaran berjumlah kecil di tahun 2003, seluruh uang tersebut kelihatannya dibayarkan kepada Jendral Simbolon sendiri, bukan kepada lembaga pemerintahan Republik Indonesia. Sangat mengkhawatirkan bahwa tampaknya pembayaran diberikan langsung ke pejabat pemerintah secara individu, bukan ke institusi pemerintah dimana dia bertugas, dan hal lain yang cukup mengganggu adalah riwayat karir militer Simbolon yang cukup kontroversial (lihat dibawah). Freeport Indonesia kelihatannya juga telah membayar sebesar 25,000 dollar AS kepada pemasok pihak ketiga untuk biaya-biaya yang ditimbulkan oleh Simbolon (untuk perincian mengenai pembayaran ini, lihat halaman 19-20).

Indonesia adalah negara berkembang dimana gaji pejabat pemerintahnya termasuk rendah dibandingkan dengan standar Barat. Pada pertengahan tahun 2000, gaji pokok seorang mayor jendral katanya sekitar 200 dollar AS per bulan, meskipun seorang perwira yang bertugas di Papua juga akan menerima uang tunjangan dinas luar kota.⁹ Pendek kata, kelihatannya Freeport telah membayar Simbolon sejumlah uang bulanan, katanya hanya untuk biaya makanan, namun jumlahnya barangkali beberapa kali lipat jumlah gaji resminya. Uang makan tersebut tidak termasuk pembayaran sekali-sekali yang jumlahnya jauh lebih besar.

Global Witness menghubungi Simbolon, yang saat ini berpangkat Inspektur Jendral Angkatan Darat, dan meminta tanggapannya atas pemberian sejumlah uang yang kelihatannya dilakukan oleh Freeport Indonesia kepadanya dan beberapa perwira lain. Jawabannya: “Setahu saya tidak ada begitu dari PT Freeport. Nggak ada.” Menurutnya tentara yang menjaga tambang Freeport menerima uang makan, tapi katanya uang tersebut “langsung ke pasukan” dan dia belum pernah menerima pemberian uang semacam itu.¹⁰

Setiap pembayaran yang dilakukan kepada aparat keamanan Indonesia oleh perusahaan swasta seharusnya dikaji tuntas (due diligence) secara menyeluruh oleh perusahaan yang bersangkutan karena TNI dan Polri memiliki reputasi yang kurang baik dalam masalah korupsi dan pelanggaran HAM. Karena alasan sejarah, pasukan keamanan telah mendapatkan sebagian besar biaya operasi mereka, bukan dari anggaran negara, melainkan dari bisnis mereka sendiri: beberapa dari bisnis mereka ini adalah legal, namun bisnis yang lain yaitu termasuk praktek pemerasan, prostitusi dan perjudian, penyelundupan dan penebangan hutan/perdagangan kayu secara liar.

Mahidin Simbolon dan Timor Timur

Proses kaji tuntas atas pembayaran kepada aparat kemanan menjadi semakin penting jika pejabat yang kelihatannya menerima pembayaran tersebut adalah Mahidin Simbolon, karena riwayat karir militernya cukup kontroversial. Dia adalah seorang veteran dari pasukan khusus Indonesia, yang digunakan oleh rezim Suharto (1966 – 1998) untuk menumpas lawan politiknya. Pada tahun 1990-an, Simbolon pernah bertugas di Timor Timur dan memiliki wewenang komando disitu, yaitu ketika penyiksaan terhadap tahanan dan napi adalah hal yang rutin menurut beberapa kelompok pembela HAM.¹¹ Orang bawahannya juga melatih para milisi lokal di Timor Timur, termasuk seorang pimpinan milisi yang dikemudian hari dihukum atas tindak kejahatan melawan kemanusiaan. Di tahun 1999 ia digambarkan sebagai “seorang perwira yang paling berpengalaman di Indonesia dalam operasi rahasia.”¹²

Di tahun 1999, Simbolon menjabat sebagai Kepala Staf Kodam [IX/Udayana] dimana pasukannya telah meluluh lantakkan Timor Timur pada tahun itu, bersekutu dengan kelompok milisi, dalam usahanya yang gagal untuk menghentikan negara ini mendapatkan kemerdekaannya melalui referendum Persatuan Bangsa Bangsa (PBB). Tindak kekerasan ini terjadi didepan mata masyarakat dan media internasional, dan menewaskan sedikitnya 1,200 rakyat sipil. Pemimpin Timor Timur menuduh Simbolon pada waktu itu sebagai salah satu dari penggerak utama tindak kekerasan tersebut. Laporan pers yang dapat diakses oleh publik telah menduga adanya hubungan antara Simbolon dan pemimpin kelompok milisi di Timor Timur yang orang-orangnya telah melakukan pembunuhan dan tindak kekerasan lain di tahun 1999. Simbolon mengatakan kepada Global Witness laporan tersebut tak berdasar dan ia mengenal pimpinan kelompok milisi seperti halnya ia mengenal tokoh perlawanan Timor Timur, namun ia tak mempunyai hubungan apapun dengan mereka (lihat boks: Mahidin Simbolon di Timor Timur dan Papua, halaman 20).¹³

Hingga saat ini, Simbolon tidak pernah dituntut oleh penegak hukum atas tindak kejahatan apapun sehubungan dengan peristiwa di Timor Timur pada tahun 1999. Tetapi, usaha yang telah dilakukan Indonesia sejauh ini untuk mengadili perwira TNI sehubungan dengan peristiwa tersebut telah dikecam oleh banyak pihak, karena dianggap tidak mencukupi, dan pemerintah Indonesia belum melakukan kerjasama dengan penyelidikan yang juga dilakukan di Timor Timur. Simbolon juga tidak pernah dituntut sehubungan dengan peristiwa pembunuhan tokoh politik di Papua, Theys Eluay, di bulan November 2001. Beberapa anggota TNI, termasuk seorang kolonel Kopassus, telah dinyatakan bersalah dan dihukum atas peristiwa pembunuhan ini. Simbolon menyatakan dia tidak

tahu menahu mengenai rencana anggota pasukannya untuk membunuh Eluay.

Walaupun Freeport McMoRan tidak dapat dianggap telah bertanggung jawab atas hubungan dan kegiatan Simbolon di Timor Timur, namun bisa dibiling bahwa dia tiba di Papua dengan sebuah tanda tanya besar mengenai riwayat karir militernya. Dan yang menambah gundah yaitu kelihatannya Freeport Indonesia telah memberikan uang dalam jumlah besar kepadanya.

Pertanyaan-pertanyaan yang Belum terjawab

Global Witness telah mempelajari adanya pembayaran-pembayaran lain dalam jumlah besar yang tampaknya diberikan oleh Freeport Indonesia kepada beberapa perwira TNI maupun Polri secara individu, bukannya kepada institusi pemerintah. Jumlah pembarayaan ini pada umumnya sekitar 200 dollar AS sampai 3,000 dollar AS, namun ada juga yang berjumlah hingga 60,000 dollar AS. Lusinan opsir di Papua, dari pangkat jendral kebawah, nampaknya telah menerima pembayaran dari Freeport Indonesia. Setelah bulan April 2003, Freeport Indonesia nampaknya telah menghentikan melakukan pembayaran kepada TNI dan Polri secara individu, dan hanya memberikan kepada institusi pemerintah Indonesia. Global Witness telah menanyakan kepada Freeport McMoRan apakah ada audit, inspeksi ataupun review setelah bulan Agustus 2002 yang menyebabkan Freeport Indonesia merubah sistemnya dalam melakukan pembayaran. Freeport McMoRan menolak untuk memberikan tanggapan.

Karena khawatir atas laporan pers yang menduga bahwa perusahaan kemungkinan telah menjadi target pemerasan anggota TNI, Yayasan Pensiunan Kota New York telah berulang kali meminta Freeport McMoRan untuk meninjau kembali hubungannya dengan pihak TNI. Terbukti dari kenyataan bahwa Yayasan Pensiunan telah mengangkat masalah ini kepada perusahaan selama tiga tahun, bahwa hingga hari ini mereka tidak puas dengan jawaban perusahaan.

Global Witness telah meminta Freeport McMoRan untuk menjelaskan dasar hukum pembayaran mereka kepada TNI dan Polri dan menjelaskan bagaimana cara mereka mendapatkan wewenang, mengeluarkan dana, dan mempertanggungjawabkan hal ini, untuk saat ini dan pada masa lalu. Global Witness juga telah meminta Freeport McMoRan untuk menjelaskan langkah audit dan pengawasan macam apa yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa dana tersebut tidak disalahgunakan atau dialihkan ke tujuan yang lain dari pada kebutuhan keamanan yang sah bagi perusahaan, seperti mendanai operasi militer melawan gerakan

kemerdekaan Papua. Pengawasan ini sangat penting karena tanpa adanya kontrol kemana uang berakhir, bermacam-macam nama yang dipakai oleh Freeport McMoRan untuk menggambarkan pembayaran ini dalam pernyataan publiknya akan tidak berarti.

Freeport McMoRan telah diberikan kesempatan untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Global Witness, namun mereka hanya memberikan jawaban-jawaban umum yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki langkah pengawasan dan kepatutan, tanpa menjelaskan apa saja langkah-langkah itu secara lebih mendetil atau menunjukkan bagaimana prakteknya (lihat boks: Apa saja yang dikatakan Freeport McMoRan ... dan yang tidak dikatakan, halaman 18). Mengingat temuan-temuan dalam laporan ini, dan karena perusahaan selalu enggan untuk menjelaskan secara menyeluruh hubungan keuangannya dengan aparat keamanan pemerintah Republik Indonesia, Global Witness percaya sudah saatnya hal ini diusut oleh pihak berwenang Amerika Serikat dengan menggunakan Undang-Undang Praktek Korupsi Luar Negeri AS dan undang-undang lain yang sesuai, dan juga oleh pihak berwenang Indonesia dengan menggunakan undang-undang negara Indonesia yang mengatur tentang pembayaran atau pemberian uang yang dilakukan oleh perusahaan swasta kepada pejabat publik.

Saatnya transparansi di daerah konflik

Masalah yang dihadapi investasi industri ekstraktif di daerah konflik tidak terbatas hanya terjadi di Indonesia. Sebuah penilaian yang dikeluarkan di bulan Maret 2005 memperlihatkan dari 70 negara yang memiliki konflik atau mempunyai resiko konflik: sedikitnya 30 negara dari 70 negara tersebut memiliki industri minyak, gas dan pertambangan yang cukup signifikan.¹⁴ Di seluruh negara ini, perusahaan-perusahaan harus transparan secara penuh mengenai pembayaran yang mereka berikan kepada aparat keamanan dan hanya melakukan pembayaran yang memang diwajibkan oleh hukum. Hal ini juga berarti bahwa perusahaan tidak boleh membayar kelompok bersenjata apapun yang tidak diakui oleh hukum atau undang-undang, misalnya kelompok pemberontak.

Ada persoalan yang lebih luas mengenai bagaimana caranya bagi perusahaan untuk menghindari keterlibatan, baik disengaja maupun tidak, dalam hal pelanggaran HAM atau tindak kejahatan lain yang mungkin terjadi di daerah konflik dimana mereka beroperasi. Persoalan ini harus menjadi hal yang pokok bagi kerja Perwakilan Khusus Sekjen PBB di bidang Bisnis dan HAM yang akan dibentuk di masa depan, pos yang pembentukannya masih didiskusikan di PBB ketika laporan ini keluar ke media [Juli 2005].

Tanpa transparansi, tidak mungkin bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang dirundung konflik bisa yakin bahwa perusahaan-perusahaan yang mendapatkan keuntungan dari kekayaan alam mereka tidak melakukan hal itu dengan mengesampingkan HAM dan prinsip pemerintahan yang baik. Hal ini juga merupakan satu satunya jalan bagi pemegang saham untuk memastikan bahwa perusahaan mengelola resiko dengan cara-cara yang tidak memperburuk konflik maupun yang membahayakan keamanan dan kebebasan perusahaan untuk beroperasi.

Transparansi akan sulit dicapai, jika hanya lewat komitmen secara sukarela dari perusahaan, karena ada resiko perusahaan akan memilih untuk tidak menyampaikan transparansi secara sukarela, atau hanya membuat komitmen retorik tentang keterbukaan tanpa memberikan informasi lengkap, seperti yang nampaknya dilakukan oleh Freeport McMoRan.

Oleh karena itu, industri ekstraktif, para investor dan pemerintah yang mengatur kegiatan mereka perlu mewajibkan perusahaan untuk memberikan informasi secara penuh dan diaudit atas pembayaran yang mereka lakukan terhadap aparat keamanan di negara-negara yang terlibat konflik bersenjata, atau memiliki resiko konflik. Perusahaan ekstraktif seharusnya tidak melakukan pembayaran sama sekali kepada kelompok bersenjata di daerah konflik, kecuali ada kewajiban hukum yang jelas untuk melakukan hal demikian.

Perusahaan ekstraktif secara rutin mengklaim bahwa mereka tidak terlibat dalam tindak kejahatan yang terjadi disekitar mereka, di daerah konflik. Untuk menunjukkan bahwa pernyataan mereka adalah benar, dan sebagai usaha supaya mereka tidak menjadi terlibat, perusahaan perlu mengungkapkan secara penuh seluruh pembayaran yang mereka lakukan kepada aparat keamanan pemerintah dan mengizinkan pembayaran mereka diaudit secara independen.

Global Witness merekomendasikan:

1. Hubungan keuangan antara Freeport McMoRan, Freeport Indonesia dan TNI serta Polri perlu diusut oleh para penegak hukum di Indonesia dan AS.
2. Seluruh pembayaran oleh perusahaan ekstraktif kepada aparat keamanan negara di daerah konflik harus diungkapkan secara menyeluruh kepada publik dan diaudit secara independen.
3. Tidak ada perusahaan ekstraktif yang boleh melakukan pembayaran kepada kelompok bersenjata di daerah konflik kecuali pembayaran tersebut secara eksplisit diwajibkan oleh hukum.

Indonesia pada Jaman Soeharto

Berbagai faktor yang membentuk kondisi investasi ekstraktif di daerah konflik di Indonesia dapat ditelusuri ke belakang ke jaman Presiden Soeharto, yang memerintah sejak tahun 1966 hingga 1998. Rezim Soeharto diwarnai oleh tingkat korupsi yang tinggi dalam pemerintahan, serta penggunaan kekerasan secara besar-besaran sebagai alat politik. Pasukan Soeharto terlibat dalam pembunuhan ratusan ribu anggota sayap kiri di tahun enam puluhan dan melakukan kekejaman di daerah-daerah konflik, khususnya Timor Timur, dimana kemungkinan 250,000 orang tewas pada masa pendudukan Indonesia yang dimulai sejak tahun 1975 dan berakhir tahun 1999, setahun setelah kejatuhan Soeharto.¹⁵ Ribuan orang juga telah tewas di Papua dan Aceh, dimana pemberontakan masih berlangsung hingga hari ini [Juli 2005].

Soeharto duduk di peringkat teratas dalam daftar yang dikeluarkan oleh Transparency International yang berisi nama-nama para penguasa yang telah mencuri dari rakyatnya sendiri, dimana diperkirakan ia telah 'merampok' sekitar 15-35 milyar dollar AS dari uang rakyat.¹⁶ Dia tidak pernah dituntut di Indonesia untuk tindak kejahatan apapun yang dilakukan pada masa kepresidenannya, dan saat ini menikmati masa pensiunnya di rumahnya di Jakarta [Juli 2005].

Korupsi yang sistemis di dalam institusi pemerintah, termasuk TNI dan Polri, adalah sebuah warisan abadi dari jaman Soeharto di Indonesia. Bahkan pada jaman Reformasi setelah kejatuhan Soeharto dari kekuasaannya, Indonesia masih berada di peringkat terbawah dalam daftar 'Corruption Perceptions Index' (Indeks Persepsi Korupsi) yang dirilis oleh Transparency International. Ini berarti Indonesia masih dianggap sebagai salah satu negara terkorup di dunia.

Sejak itu Bank Dunia, yang dituduh telah menutup mata atas korupsi Soeharto, telah menyatakan perang terhadap korupsi sebagai tema sentral untuk tugas mereka di Indonesia. Di tahun 2004, Bank Dunia mencatat bahwa: "prestasi yang dicapai beberapa tahun belakangan masih tetap di bayangi awan gelap berupa keprihatinan yang luas terhadap sistem pemerintahan dan tingkat korupsi di seluruh masyarakat Indonesia. Harapan yang tinggi bahwa gerakan Reformasi akan menghentikan kepentingan kelompok serta KKN yang telah menjadi ciri di tahun belakangan jaman Soeharto belum terwujud. Hanya sedikit yang telah dimintai pertanggung jawaban atas pencurian yang mereka lakukan terhadap kekayaan publik."¹⁷

Rezim Soeharto memperlakukan daerah-daerah Indonesia yang kaya dengan sumber alamnya sebagai sumber kekayaan untuk dieksploitasi. Lawan politik lokal ditumpas oleh

militer, dimana taktiknya termasuk "memanipulasi para elit yang bersaing, menggunakan fitnah, ancaman, pemerasan, penculikan, pemalsuan, mempekerjakan penjahat, mendorong kekerasan dan pembunuhan."¹⁸

Akibatnya adalah pemberontakan di Papua di bagian ujung Timur kepulauan Indonesia, dan Aceh di bagian ujung barat. Hal yang sama juga dicoba lakukan di Timor Timur, namun gagal, dan sekarang telah menjadi negara berdaulat Timor Leste.

TNI telah memainkan peranan yang jauh lebih kecil dalam politik dalam negeri Indonesia sejak berakhirnya periode Soeharto, dan telah membatasi diri dalam mencampuri proses demokrasi, namun riwayatnya dengan HAM masih bermasalah. Pembunuhan rakyat sipil dan pelanggaran HAM lain yang serius masih tetap dilaporkan dari Papua dan Aceh, dan hanya sedikit perwira yang telah dimintai pertanggung jawabannya atas tindak kejahatan yang dilakukan oleh pasukannya. Polri, khususnya Brigade Mobil (Brimob), juga memiliki reputasi yang buruk dalam bidang HAM.

Pertanggung jawaban TNI yang lemah juga berlaku pada keuangannya. Sejak awal, TNI membiayai sebagian besar biaya operasinya dari kegiatan bisnis mereka, bukannya dari anggaran negara, dan mereka memiliki kerajaan niaga sendiri. Sebagian pemasukan datang dari perusahaan sah yang dimiliki TNI, namun beberapa prajurit juga terlibat dalam kegiatan kriminal, seperti penebangan hutan/perdagangan kayu secara liar, penyelundupan, penjualan obat-obatan terlarang dan pemerasan.

Masalah yang sama juga ditemukan di Kepolisian, yang hingga tahun 1999 adalah bagian dari TNI, dan kedua institusi ini memiliki masalah serius dengan korupsi internal mereka. Agar keuangan TNI lebih dapat dipertanggung jawabkan kepada publik, pemerintah Indonesia saat ini berencana untuk mengambil alih sebagian kegiatan bisnisnya dan menempatkannya di bawah kendali sipil. Kemudian juga ada usaha untuk mentransfer tanggung jawab utama untuk melindungi aset vital negara, termasuk minyak dan pertambangan, dari TNI ke Polri.

Papua dan Aceh sangat kaya akan mineral dan kayu, dan usaha aparat keamanan untuk menegakkan kedaulatan Indonesia di kedua daerah telah jalin menjalin dengan kepentingan bisnis TNI dan Polri. Di bulan Februari 2005, sebuah penyelidikan yang dilakukan oleh dua lembaga swadaya masyarakat menemukan bahwa tentara dan pejabat pemerintah telah berkolusi dalam penipuan besar-besaran yang mengeksplor kayu yang diambil

secara ilegal dari Papua ke China. Laporan yang dirilis oleh Environmental Investigation Agency dan Telapak menemukan bahwa “perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pencurian kayu di Papua dibantu setiap saat oleh pejabat tentara, polisi dan Departemen Kehutanan, sepanjang uang sogokan yang diminta dibayar ... Tentara terlibat di semua aspek penebangan hutan/perdagangan kayu secara liar di Papua.”¹⁹

Pemerintah setelah Soeharto mengakui bahwa kebencian masyarakat setempat atas eksploitasi kekayaan alam mereka adalah salah satu pemicu dari pemberontakan di Papua dan Aceh, dan pemerintah telah berusaha untuk menyelesaikan konflik ini dengan menawarkan kedua provinsi otonomi yang lebih besar, dan bagian yang lebih besar dari pemasukan yang datang dari sumber alam. Hingga saat ini [Juli 2005], usaha ini masih dicoba dengan susah payah, sementara bentrokan antara tentara dan gerilyawan setempat masih terus berlangsung di Aceh, bahkan setelah daerah tersebut hancur di bulan Desember 2004 akibat bencana tsunami.

Ada juga kekerasan yang berlangsung secara sporadis di Papua, dimana kepentingan strategis TNI nampaknya semakin meningkat. Pada bulan Maret 2005, TNI mengumumkan rencananya untuk memperkuat barisannya di Papua dengan menambah 15,000 tentara pada masa empat tahun kedepan.²⁰

Aset yang paling berharga di Papua dilihat dari segi pendapatan adalah tambang Freeport, yang menyumbang sebesar 2,347 milyar dollar AS dalam bentuk pajak dan royalti kepada pemerintah Indonesia dari tahun 1992 hingga 2003.²¹ Sebuah proyek gas alam baru, bernama Tangguh LNG dan dikelola oleh perusahaan minyak BP, juga akan menjadi sumber pendapatan utama setelah tahun 2010.

Demikian operasi sebuah perusahaan seperti Freeport di Papua dilatarbelakangi kondisi politik yang tidak stabil, korupsi dan kekerasan yang sering dihubungkan dengan kontrol atas pendapatan dari sumber alam. Karena alasan ini, kegiatan dan pergaulan Freeport telah menjadi perhatian bagi beberapa pemilik saham perusahaan ini, maupun rakyat Papua dan kelompok pembela HAM. Seperti yang akan diperlihatkan oleh laporan ini, memang ada alasan bagi mereka untuk prihatin.

Freeport Di Papua

Freeport McMoRan Copper & Gold Inc, yang sebelumnya dikenal sebagai Freeport Sulphur, adalah sebuah perusahaan yang berpangkalan di kota New Orleans, Amerika Serikat.

Pada bulan Desember 2004, perusahaan ini secara langsung memiliki saham sebesar 81.28% di Freeport Indonesia, anak perusahaan yang menjalankan usaha pertambangan di Papua, dan secara tidak langsung memiliki saham sebesar 9.36% di Freeport Indonesia melalui perusahaan lokal bernama Indocopper Investama. Sisanya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Rakyat setempat, pemerhati asing dan pejabat perusahaan pada umumnya menyebut perusahaan induk di AS dan anak perusahaan lokal sebagai “Freeport”.

Rio Tinto, konglomerat tambang dunia, membeli saham di Freeport McMoRan pada tahun 1995. Dibulan Maret 2004, ketika saham ini berjumlah 11.9%, Rio Tinto menjual kembali sahamnya kepada Freeport McMoRan. Namun, Rio Tinto masih memiliki kongsi dengan Freeport Indonesia yang membuatnya berhak mendapatkan bagian keuntungan dari tambang Grasberg.

Freeport mulai menjelajahi sebagian barat New Guinea, yang pada waktu itu merupakan jajahan Belanda, di tahun 1960. Indonesia mengambil alih daerah itu dua tahun kemudian, menggabungkannya di tahun 1969 dan kemudian menamakannya Irian Jaya, walaupun daerah itu kemudian dinamai kembali Papua. Kedatangan perusahaan itu membawa bentrokan tiga kebudayaan, yaitu antara etnis Melanesia Papua, eksekutif Freeport dari Barat dan budaya etnis Melayu yang merupakan mayoritas di Indonesia.

Ekspor tembaga dari tambang Freeport bermula di tahun 1972.²² Sebelum Freeport datang, daerah sekitar lokasi tambang hanya mempunyai sedikit kontak dengan dunia luar, dan pada masa-masa awal ada ketegangan antara perusahaan dengan masyarakat setempat mengenai masalah hak atas tanah dan apa yang dilihat masyarakat setempat sebagai kegagalan perusahaan untuk berbagi kekayaan harta benda materil perusahaan dengan masyarakat setempat, sesuai dengan adat istiadat setempat. Eksekutif Freeport George Mealey menulis: “ketika kegiatan tambang dimulai tahun 1973, serangkaian protes [oleh penduduk setempat] memperlihatkan bahwa perusahaan memiliki masalah.” Pada tahun 1974 Freeport setuju untuk membangun sekolah, klinik dan bangunan lain, dan menyediakan rumah dan pekerjaan bagi rakyat setempat.²³ Pendapat lain datang dari seseorang yang mengunjungi tambang di pertengahan 1970-an yang menyebutkan:

“Kebijakan Freeport yang tidak memadai dalam menangani masalah dengan rakyat setempat dapat disimpulkan sebagai berikut: kalau kita abaikan mereka, mungkin pada akhirnya mereka akan hilang.”²⁴

Lokasi tambang telah dijaga sejak awal 1970-an oleh pasukan TNI, yang mana perlakuan mereka yang sering brutal terhadap penduduk setempat semakin menambah kebencian penduduk terhadap perusahaan. Pada tahun 1977, terjadi pemberontakan terhadap pemerintahan Indonesia diseluruh pegunungan tengah Papua. Pada masa pemberontakan ini, pemberontak memotong jalur pipa utama yang membawa cairan tembaga dari tambang Freeport. Pihak TNI membalas dengan menyerang penduduk setempat dari udara, dan sebuah kelompok HAM mengutip seorang karyawan perusahaan yang menyebutkan bahwa pasukan yang berada di lokasi tambang telah menembakkan mortir ke arah desa di dekat tambang dan juga “setiap penduduk asli yang terlihat ditembak mati di tempat.”²⁵

Mealey dari Freeport tidak menyebut mengenai tewasnya rakyat sipil, namun ia mencatat di bukunya bahwa :”Dalam aksi balasan yang sangat cepat oleh tentara Indonesia, hampir seluruh 17 bangunan yang dibangun oleh Freeport untuk penduduk setempat hancur, dan beberapa kamp liar terbakar.”²⁶

Pada tahun 1989, Freeport mulai menggali endapan tembaga dan emas Grasberg yang melimpah, dan menjadikan Freeport dari sebuah perusahaan penghasil logam yang biasa-biasa saja menjadi salah satu operator tambang yang menguntungkan dan terbesar di dunia. Ekspansi perusahaan menciptakan pertumbuhan ekonomi disekitar tambang dan menjadikan Freeport Indonesia sebagai perusahaan pembayar pajak terbesar di Indonesia. Ia juga menarik minat puluhan ribu pendatang yang ingin memperbaiki kehidupan ekonomi mereka, dan tinggal di sekitar kota Timika, menciptakan masyarakat yang bermacam-macam dan sukar dikendalikan, dimana kerusuhan yang terjadi antara kelompok etnis yang saling bersaing telah mengakibatkan kematian lusinan orang sejak tahun 1990.

Rejim Soeharto hanya melakukan sedikit usaha untuk memberikan pelayanan publik ke daerah, walaupun populasi berkembang, sehingga Freeport akhirnya membiayai pembangunan jalan, perumahan, fasilitas kesehatan dan sarana publik lain termasuk sekolah, pendidikan dan pelatihan bisnis bagi penduduk setempat dan program pemberantasan malaria. Hal-hal tersebut tidak akan ada jika Freeport tidak membangunnya. Perusahaan juga mengeluarkan banyak uang untuk pembangunan fasilitas bagi staff dan tamu mereka, termasuk hotel Sheraton di Timika dan sebuah kota (milik

perusahaan yang bersahabat lingkungan bernama Kuala Kencana. Perluasan tambang menimbulkan polusi lingkungan, yang disebabkan oleh dibuangnya limbah pertambangan oleh Freeport ke sungai, dan mengundang kritik yang terus bertambah dari masyarakat lokal dan LSM dari dalam dan luar negeri.

Kekayaan tambang Grasberg yang sangat besar menarik perhatian elite penguasa di Jakarta. Di awal tahun 90-an, menurut sebuah artikel di tahun 1998 di harian Wall Street Journal, pejabat perusahaan berada dibawah tekanan untuk melibatkan rekan dan keluarga Soeharto kedalam transaksi bisnis. Freeport McMoRan membantu rekanan Soeharto membeli saham dalam usaha tambang maupun beberapa perusahaan jasa pendukung, dengan cara menjamin pinjaman bank buat mereka. Antara tahun 1991 dan 1997, Freeport McMoRan menjaminkan sebesar 673 juta dollar AS bagi pinjaman semacam itu, dan memberikan paling sedikit sebesar 61,6 juta dollar AS untuk pendanaan lebih lanjut yang dikemudian hari harus dianggap lunas oleh perusahaan.²⁷ Pada masa ini, Chief Executive Freeport McMoRan, James Moffett, sering bermain golf bersama Soeharto dan berteman dengan orang-orang dari kalangan Soeharto.²⁸

Freeport McMoRan mengklaim bahwa mereka tidak punya pilihan kecuali berhubungan dengan orang-orang yang dekat dengan Soeharto, yang mendominasi perekonomian Indonesia pada saat itu. Setelah kejatuhan Soeharto, hubungan relasi ini menimbulkan dugaan adanya KKN, kependekan dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pada bulan November 1998, Moffett ditanya selama sembilan jam oleh jaksa Indonesia sehubungan dengan dugaan tersebut. Beberapa kali Moffett menyatakan kepada pers: “Tidak ada KKN di Freeport Indonesia.”³⁰ Tidak ada tuntutan yang diajukan.

Freeport McMoRan menolak memberi jawaban spesifik bagi pertanyaan yang diajukan oleh Global Witness mengenai kejadian ini ataupun permintaan untuk menanggapi sebuah artikel di harian Wall Street Journal di tahun 1998 (lihat boks: Apa yang dikatakan oleh Freeport McMoRan ... dan apa yang tidak dikatakan, halaman 18).

Sementara tambang Grasberg terus berkembang, konflik di Papua pun terus berlanjut. Pada bulan Oktober 1994, pembunuhan atas seorang karyawan Freeport yang berasal dari Papua oleh kelompok bersenjata tak dikenal menyebabkan TNI mengambil tindakan keras di kawasan tersebut. Selama enam bulan, sebanyak 37 orang Papua dibunuh oleh aparat atau hilang.³¹ Petugas Keamanan swasta Freeport Indonesia dituduh oleh aktivis HAM terlibat dalam pembunuhan, penyiksaan dan pelanggaran lain pada masa ini. Freeport

menyatakan: “dimana tuduhan adanya pelanggaran HAM timbul di daerah operasi kami, kami akan mendukung setiap penyelidikan yang sah – yang mana tak satupun dari penyelidikan tersebut menemukan adanya kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan ataupun karyawan kami” (lihat boks: Apa yang dikatakan oleh Freeport McMoRan ... dan apa yang tidak dikatakan, halaman 18).

Freeport berusaha memperbaiki hubungannya dengan masyarakat Papua setempat dan sedang bernegosiasi dengan pimpinan masyarakat mengenai rencana pembentukan dana pembangunan lokal, ketika kerusuhan timbul di Timika pada bulan Maret 1996. Walaupun kelihatannya ada rasa kegetiran yang kuat di antara penduduk setempat, juga ada kesan bahwa kerusuhan digerakkan oleh militer untuk memberikan sinyal kepada Freeport bahwa mereka tidak akan dapat beroperasi secara aman tanpa perlindungan TNI.³² Setelah kerusuhan, Freeport setuju untuk melakukan pembayaran secara tetap kepada TNI dan Polri. Seorang juru bicara dari Freeport Indonesia menyatakan kepada pers di tahun 2003 bahwa perusahaan memang telah melakukan pembayaran kepada TNI sejak tahun 70-an dan perjanjian baru yang dibuat tahun 1996 semata-mata membuat kesepakatan ini lebih komprehensif.³³

Sampai lama, tidak banyak informasi yang keluar mengenai pembayaran ini. Sebuah laporan di tahun 2000 oleh seorang akademisi yang berbasis di Australia bernama Lesley McCulloch, menyebutkan seorang karyawan Freeport yang tidak mau disebut namanya sebagai sumber informasinya, yang menyatakan bahwa TNI pada awalnya meminta 100 juta dollar AS dari perusahaan di tahun 1996, namun pada akhirnya setuju dengan 35 juta dollar AS untuk landasan baru, dan setelah itu pembayaran tahunan sebesar 11 juta dollar AS. McCulloch menulis: “(Tambang Grasberg) dilihat oleh TNI sebagai sebuah bisnis yang menguntungkan dimana mereka ‘meminta’ – dengan cukup berhasil – ‘andil/sebagian’ dari keuntungan.” Tambahnya: “Hasilnya barak, perlengkapan dan kendaraan di daerah tersebut jauh lebih baik dari daerah lain, begitu juga dengan saldo bank pribadi beberapa individu tertentu yang kabarnya menyedot (keuntungan) hingga sepertiga dari jumlah total bagi mereka dan bawahan mereka.”³⁴

Freeport McMoRan telah mengkonfirmasi bahwa mereka telah mengeluarkan sebanyak 35 juta dollar AS selama beberapa tahun untuk “pembangunan secara terpisah perumahan dan kantor untuk mengakomodasi personalia keamanan pemerintah”.³⁵ Sementara untuk pembayaran tahunan, Freeport McMoRan memperlihatkan sebuah angka yaitu 4,7 – 5,9 juta dollar AS per tahun untuk tahun 2001 – 2003 dalam keterangannya ke SEC (lihat bawah).³⁶ Global Witness meminta

tanggapan Freeport McMoRan atas pernyataan McCulloch. Freeport McMoRan menolak untuk memberikan tanggapan (lihat boks: Apa yang dikatakan oleh Freeport McMoRan ... dan apa yang tidak dikatakan, halaman 18).

Walaupun keberadaan TNI dan Polri begitu banyak, serangan kekerasan yang tidak dapat dijelaskan terhadap karyawan Freeport Indonesia tetap terjadi. Pada bulan Oktober 2001, dua orang karyawan terluka dalam sebuah insiden penembakan. Pada bulan Mei 2002, sekelompok orang bersenjata menyerang kantor-kantor perusahaan di kota Kuala Kencana dan mencoba menembak seorang petugas keamanan.³⁷

Di awal tahun 2002, ada perbincangan antara pejabat Freeport untuk meningkatkan transparansi mengenai hubungan perusahaan dengan aparat keamanan Indonesia. Pendeta David Lowry, tadinya Vice President untuk Hubungan Sosial dan Kemasyarakatan di Freeport McMoRan, mengatakan kepada Global Witness pada bulan Juni 2005 bahwa: “(perbincangan itu) terjadi selama beberapa bulan sebelum tanggal 31 Agustus. Saya rasa ketika itu musim semi ketika pertama kali hal ini diperbincangkan.” Lowry mengatakan bahwa ia sendiri tidak terlibat dalam mengelola hubungan dengan aparat keamanan.³⁸

Tanggal 31 Agustus 2002 adalah tanggal yang penting karena pada hari itu beberapa orang bersenjata menyerang secara tiba-tiba sekelompok guru yang bekerja pada Freeport Indonesia di lokasi dekat tambang. Tiga orang terbunuh – dua orang warganegara Amerika Serikat: Rick Spier dan Edwin Burgon, dan seorang warga negara Indonesia: Bambang Riwanto – serta 11 orang lainnya luka-luka. Pembunuhan ini menarik perhatian dunia internasional terhadap hubungan Freeport dengan aparat keamanan Indonesia, dan penyelidikan terhadap serangan tersebut telah menjadi sebuah faktor penting dalam hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Indonesia. (lihat boks: Serangan Agustus 2002, halaman 15).

“Tidak benar dan tidak relevan” versus “bantahan Yang sangat berlebihan”: Freeport dan para investor

Serangan Agustus 2002 menambah keprihatinan diantara para investor atas hubungan antara Freeport dan TNI. Dua yayasan pensiun yang memiliki saham di Freeport McMoRan – the New York City Employees Retirement System dan the New York City Teachers Retirement System – mengajukan proposal untuk diikutkan dalam voting pada rapat umum tahunan perusahaan pada bulan Mei 2003.

Proposal tersebut menyuarakan keprihatinan yayasan bahwa: “perusahaan transnasional yang beroperasi di negara-negara yang memiliki pemerintahan yang represif, konflik etnis, norma hukum yang lemah, korupsi yang merajalela, atau tenaga kerja dan standard lingkungan hidup yang buruk menghadapi resiko yang cukup serius terhadap reputasi maupun nilai saham mereka, jika mereka dilihat bertanggung jawab atau terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)”. Proposal tersebut juga menyatakan: “telah banyak laporan pelanggaran HAM oleh TNI terhadap penduduk asli (Papua) sehubungan dengan operasi keamanan yang dilakukan atas nama Freeport McMoRan” dan “diantara korban serangan kekerasan adalah pegawai perusahaan.” Proposal tersebut juga memperhatikan bahwa pegawai perusahaan pada masa silam telah dituduh atas pelanggaran HAM.⁴⁰

Proposal tersebut menyerukan kepada Freeport McMoRan untuk mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu kontrol kedalam yang ketat untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran HAM akan dilaporkan sebagaimana mestinya. Yang kedua yaitu Dewan Direktur harus melaporkan kepada pemegang saham mengenai implementasi kebijakan HAM Freeport di luarnegri. Laporan ini “harus meliputi informasi mengenai akibat HAM dalam hubungan keamanan perusahaan dengan militer Indonesia.”⁴¹

Pada tanggal 3 Januari 2003, pengacara Freeport McMoRan menulis kepada “Securities and Exchange Commission” (SEC), yaitu sebuah badan resmi di AS yang tugasnya memastikan bahwa perusahaan mempublikasikan informasi tertentu supaya para investor dapat mengambil keputusan investasi berdasarkan informasi yang cukup mengenai perusahaan yang bersangkutan. Surat tersebut menyatakan bahwa Freeport tidak berencana untuk memasukkan proposal yayasan pensiun kota New York kepada para pemegang sahamnya. Argumentasinya yaitu Freeport sudah menjawab keprihatinan mengenai HAM yang dikemukakan dalam proposal, dengan cara mengadopsi sebuah kebijakan HAM yang ketat dan mensosialisasikannya kepada para karyawannya.

Ia juga mencatat bahwa Freeport telah mengangkat Hakim Gabrielle Kirk McDonald, dulunya ketua Pengadilan Kriminal Internasional untuk negara bekas Yugoslavia, sebagai Penasihat khusus untuk masalah HAM, dan ikut menandatangani inisiatif AS-Inggris bagi perusahaan minyak dan tambang, yang disebut Prinsip Sukarela untuk masalah Keamanan dan HAM (lihat Kesimpulan, halaman 27).⁴²

Menjawab permintaan Yayasan Pensiun untuk informasi lebih terperinci mengenai hubungan mereka dengan TNI, pengacara Freeport menyatakan: “Perusahaan mengeluarkan laporan tahunan tentang Ekonomi, Sosial dan Lingkungan dan akan mengeluarkan laporan yang sama di tahun 2003.”⁴³

Laporan ini, yang juga disebut Laporan Pembangunan Berkelanjutan, adalah sebuah terbitan tahunan yang isinya sangat pendek dan menggunakan bahan kertas mengkilap, dengan foto-foto rakyat Papua sedang tersenyum, dan membicarakan mengenai “usaha Freeport untuk terus tetap berada di jalur pembangunan berkelanjutan”.⁴⁴ Laporan tahun 2001 tentang Ekonomi, Sosial dan Lingkungan tidak menyinggung tentang pembayaran untuk perlindungan TNI dan Polri, namun laporan itu memang menyebutkan bahwa Freeport telah membangun “perumahan dan fasilitas penunjang yang layak” untuk pasukan keamanan. Hakim McDonald yang dikutip dalam laporan ini menyatakan “petugas keamanan yang hidup dalam kondisi buruk tanpa rekreasi dan tanpa rasa kebersamaan dengan penduduk setempat akan lebih mudah melakukan pelanggaran HAM terhadap penduduk setempat dan pada akhirnya melakukan pelanggaran HAM terhadap mereka.” Ia menambahkan bahwa hampir tidak ada pelanggaran HAM di daerah kontrak Freeport semenjak langkah ini diambil.⁴⁵

Freeport juga mengirimkan kepada Yayasan Pensiun Kota New York, yang diwakili oleh Kantor Pengawas Keuangan Kota New York, sebuah naskah dari dokumen yang merupakan kunci dalam diskusi tentang Freeport dan aparat keamanan Indonesia. Isinya merupakan sebuah pernyataan mengenai biaya keamanan Freeport di Indonesia yang termasuk informasi yang sebelumnya belum pernah dipublikasikan oleh perusahaan. Sejauh yang diketahui Global Witness, draft tersebut pertama kali dikirim kepada Yayasan Pensiun Kota New York pada tanggal 27 Januari 2003.⁴⁶ Kemudian draft ini keluar di prospektus untuk penawaran surat obligasi oleh perusahaan pada bulan Februari 2003.⁴⁷

Pada bulan Maret 2003, pernyataan ini dicantumkan pada laporan 10-K Freeport McMoRan untuk tahun sebelumnya. Laporan 10-K merupakan dokumen publik yang dikirim oleh perusahaan setiap tahun kepada SEC, untuk memberikan gambaran ikhtisar kepada para investor mengenai bisnis dan kondisi keuangan perusahaan. Laporan 10-K tahun 2002 menyebutkan bahwa Freeport Indonesia telah membayar sebesar 4,7 juta dollar AS sebagai “biaya bantuan untuk jasa keamanan yang diberikan oleh pemerintah (support costs for government-provided security)” pada tahun 2001, dan 5,6 juta dollar AS pada tahun 2002. Pembayaran ini meliputi: “bermacam-macam infrastruktur dan biaya-biaya lain seperti biaya makan dan ruang makan, perumahan, bahan bakar, perjalanan, perbaikan kendaraan, ongkos-ongkos tambahan, program bantuan masyarakat yang dilakukan oleh tentara/polisi (various infrastructure and other costs, such as food and dining hall costs, housing, fuel, travel, vehicle repairs, allowances to cover administrative and incidental costs, and community assistance programmes conducted by the military/police).” Freeport Indonesia juga membayar sebesar 900,000 dollar AS selama dua tahun untuk infrastruktur yang berhubungan.⁴⁸

Sebelum ini, belum pernah ada pernyataan semacam itu dalam laporan 10-K Freeport McMoRan untuk tahun 2000 maupun 2001, karena itu laporan tahun 2002 tampaknya mewakili peningkatan usaha keterbukaan yang cukup berarti. Seorang jubah perusahaan mengatakan kepada sebuah terbitan industri bernama *American Metal Market*, bahwa informasi tersebut “sebenarnya merupakan bagian dari Laporan Pembangunan Berkelanjutan yang kami keluarkan setiap minggu, dan baru akan dicetak sedikitnya seminggu atau 10 hari lagi. Kami menerima permintaan dari pemegang saham untuk membicarakan mengenai kebijakan HAM kami, dan kami merespon kepada SEC dan meminta untuk tidak memasukkan permintaan pemegang saham kami dari proxy/wakil kami. Mereka menyetujui permintaan kami, namun dalam surat menyurat, pemegang saham juga meminta informasi lebih banyak mengenai hubungan kami dengan militer Indonesia.”⁴⁹

Tetapi Yayasan Pensiun Kota New York tidak puas. Pada tanggal 27 Februari 2003, setelah melihat naskah pernyataan oleh Freeport McMoRan, Kantor Pengawas Keuangan menulis surat kembali kepada SEC. Surat tersebut sependapat bahwa Freeport telah menunjukkan bahwa mereka telah melaksanakan kebijakan HAM mereka, namun merasa bahwa perusahaan belum berbuat cukup banyak, dalam rangka memenuhi permintaan untuk informasi yang lebih terperinci atas hubungan mereka dengan TNI. Sebagai landasan keprihatinan mereka, surat tersebut mengutip sebuah laporan

yang dikeluarkan oleh Komisi PBB melawan Penyiksaan, dan dua buah laporan yang dikeluarkan oleh organisasi HAM, semuanya menduga keras bahwa pasukan TNI bertanggung jawab atas pelanggaran HAM.⁵⁰

Surat dari pemegang saham memperhatikan beberapa artikel dari media AS yang melaporkan kecurigaan adanya hubungan antara serangan Agustus 2002 dengan TNI (lihat halaman 15). Khususnya, surat tersebut mengutip artikel pada harian *New York Times* tertanggal 30 Januari 2003 yang berjudul “AS menghubungkan pasukan TNI dengan kematian dua warga negara Amerika”. Artikel ini melaporkan bahwa pejabat AS percaya anggota TNI terlibat dalam serangan. Surat kabar tersebut memberi kesan bahwa motif penyerangan berhubungan dengan pembayaran untuk jasa keamanan oleh Freeport Indonesia. Sehari setelah artikel ini terbit, Kedutaan AS di Jakarta mengeluarkan bantahan.

Surat dari pemegang saham menyebutkan: “artikel di harian *New York Times* lebih jauh menyatakan bahwa perusahaan menerima ancaman aksi balas dendam dari TNI jika pembayaran tidak dilanjutkan; “pemerasan, murni dan simpel,” tulis artikel tersebut, mengutip seorang analis intelijen dari Barat. Gambaran yang menunjukkan bahwa pembayaran ini adalah sebuah praktek pemerasan menambah keprihatinan apakah pembayaran semacam ini melanggar *Foreign Corrupt Practices Act* dari tahun 1977 (“The *New York Times* article further states that the company had received threats of retaliation from the military if more money was not forthcoming: “[e]xtortion, pure and simple,” the article states, quoting a Western intelligence analyst. The characterization of these payments as extortion raises the additional concern of whether such payments violate the *Foreign Corrupt Practices Act of 1977*”).⁵¹ [*Foreign Corrupt Practices Act* atau Undang-Undang Praktek Korupsi Luar Negeri adalah undang-undang Amerika Serikat yang mengatur pembayaran dari perusahaan-perusahaan AS kepada pejabat negara asing.]

Balasan dari pengacara Freeport tanggal 3 Maret 2003 kepada SEC berisi kritik dengan tulisan yang tajam kepada Yayasan Pensiun Kota New York, dan menyebutkan preseden hukum yang ditulis pada surat mereka tertanggal 27 Februari adalah “salah penerapan (misapplied)”, tuntutan mereka “tidak benar dan tidak relevan (false and irrelevant)” dan permintaan mereka akan informasi yang lebih terperinci tentang hubungan Freeport dengan TNI “tidak layak (without merit)”. Surat ini menambahkan: “tidak puas dengan mengulang tuduhan yang tidak berdasar, dan secara umum mendikreditkan pihak lain, Penganjur (yaitu Yayasan Pensiun Kota New York) telah menambah spekulasi publik bahwa “keprihatinannya” atas laporan yang belum

terbukti kebenarannya tentang “pemerasan” yang dilakukan oleh anggota TNI, dapat memberi kesan bahwa perusahaan kemungkinan terlibat dalam pelanggaran Undang-Undang Praktek Korupsi Luar Negri (Not satisfied with repeating the unfounded and generally discredited assertions of others, the Proponent adds to the public speculation its “concern” that unsubstantiated reports of “extortion” by the military could suggest that the company may be engaged in violations of the US Foreign Corrupt Practices Act.)”⁵²

Pengacara Freeport terus menjelaskan kebijakan etika dan tindakan bisnis perusahaan dan menyatakan bahwa para pegawai menerima pelatihan secara rutin mengenai masalah ini. Mereka menambahkan bahwa kebijakan perusahaan selalu disertifikasi tiap tahunnya dan dilaporkan kepada dewan, dan bahwa perusahaan “dengan berkonsultasi dengan penasihat hukum dari luar dan penasihat khusus masalah Undang-Undang Praktek Korupsi Luar Negri, secara berkala meninjau kembali kebijakan dan prosedurnya terhadap bantuan keamanan yang diberikan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa perusahaan terus berusaha memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku. Perusahaan yakin bahwa kegiatan mereka tidak melanggar Undang-Undang Praktek Korupsi Luar Negri (the company periodically reviews, in consultation with outside legal advisers and special FCPA counsel, its policies and procedures for government-provided security support to ensure that the company continues to meet the applicable legal requirements. The company is confident that its activities are not in violation of the FCPA.)”⁵³

Keesokan harinya, yaitu pada tanggal 4 Maret 2003, Kantor Pengawas Keuangan Kota New York menulis kembali kepada SEC, bahwa: “penolakan perusahaan atas laporan-laporan oleh media, dan organisasi HAM yang mempunyai nama baik, serta bantahannya yang sangat berlebihan adalah salah tanggap. Tanpa bermaksud menyalahkan perusahaan sama sekali, masalah ini telah menarik perhatian banyak media massa dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, dan layak dianggap sebagai masalah yang sah dan serius bagi mereka yang memiliki perusahaan (The company’s dismissal of reports by reputable news and human rights organizations and its almost hysterical denial of wrongdoing miss the point. Without attributing any blame to the company, this issue has generated enough media attention and raised enough questions to be a legitimate and serious concern to those who own the company.)”⁵⁴

Kantor Pengawas Keuangan juga sangat negatif mengenai pernyataan tentang biaya keamanan Freeport di Indonesia, yang telah dikirim perusahaan kepada Yayasan Pensiun Kota New York sebelum menerbitkannya dalam laporan 10-K

pada bulan Maret 2003. “Karena sekarang perusahaan telah mengeluarkan dokumen sehingga dapat diakses oleh publik, sangat jelas bagi siapa saja yang membacanya bahwa ... tidak menjawab permohonan proposal untuk sebuah peninjauan kembali dan sebuah laporan oleh Dewan Direktur. Ia juga tidak menyinggung tuduhan atas pelanggaran HAM oleh militer Indonesia dan apa akibatnya, jika ada, bagi perusahaan. (“Now that the company has essentially put the document in the public domain, it is obvious to anyone who reads it that... it is not responsive to the proposal’s request for a review and a report by the Board of Directors. It does not deal at all with the allegations of human rights abuses by the Indonesian military and what impact, if any, it has on the company.”)⁵⁵

Surat tersebut menyimpulkan: “Yayasan Pensiun Kota New York percaya bahwa besarnya masalah yang dihadapi perusahaan akibat hubungannya dengan TNI (yang dibuktikan dengan serangan yang tragis baru-baru ini terhadap karyawan perusahaan) membuat laporan ini menjadi penting, hingga pada dasarnya proposal tidak dapat dianggap telah dilaksanakan karena masalahnya sendiri belum mendapat perhatian perusahaan hingga saat ini (The Funds believe that the magnitude of the problems faced by the company as a result of its ties to the Indonesian military (as evidenced by this most recent tragic attack on the company’s employees) makes the report take on such a significance that the proposal can’t be deemed substantially implemented since the issue has not been addressed by the company to date.)”⁵⁶

Namun SEC setuju dengan Freeport McMoRan. Divisi Keuangan Perusahaan Komisi tersebut menulis surat kepada perusahaan pada tanggal 5 Maret 2003 bahwa: “Kelihatannya ada dasar untuk pendapat Anda bahwa Freeport McMoRan boleh tidak mengikutsertakan proposal (There appears to be some basis for your view that Freeport McMoRan may exclude the proposal)”.⁸⁰ Dua bulan kemudian, proposal tidak dimasukkan kedalam voting pada rapat umum tahunan 2003.

Freeport McMoRan selanjutnya membuat pernyataan yang sama dalam laporan 10-K nya sejak tahun 2002. Pada tahun 2003 perusahaan menyatakan bahwa:”andil Freeport Indonesia dalam biaya bantuan untuk jasa keamanan yang diberikan oleh pemerintah, yang meliputi lebih dari 2,300 petugas keamanan pemerintah Indonesia yang saat ini berlokasi di kawasan operasi kami, yaitu 5,9 juta dollar AS.” Untuk tahun 2004, angkanya yaitu 6,9 juta dollar AS.

Perusahaan juga telah mengumumkan biaya yang dikeluarkan oleh Freeport Indonesia untuk departemen in-house security nya, yang memiliki beberapa ratus pegawai tak

bersenjata. Menurut laporan 10-K, biaya untuk menjalankan departemen ini naik hampir dua kali lipat dari 6,8 juta dollar AS di tahun 2001, menjadi 12,3 juta dollar AS di tahun 2004. Global Witness menanyakan kepada Freeport McMoRan jika pembayaran kepada aparat keamanan pemerintah keluar dari anggaran ini, dan apakah perwira TNI atau Polri yang masih aktif, dipekerjakan juga oleh departemen keamanan Freeport Indonesia. Freeport McMoRan menolak menjawab pertanyaan ini.

Yayasan Pensiun Kota New York menyusun proposal baru pada rapat umum tahunan Freeport McMoRan di bulan Mei 2004 yang meminta perusahaan untuk menanggung pembayaran kepada TNI dan Polri sampai pemerintah Indonesia bekerja sama secara penuh dalam penyelidikan kasus pembunuhan Agustus 2002. Kali ini proposal diberikan kepada pemegang saham. Chief Executive Freeport McMoRan, Richard Adkerson menyatakan dalam rapat bahwa: "Manajemen dan Dewan percaya bahwa proposal pemegang saham telah salah menginterpretasikan hubungan perusahaan dengan institusi keamanan Indonesia dan menyarankan tindakan yang hanya akan merusak hubungan perusahaan dengan pemerintah Indonesia dan keamanan operasi perusahaan (the management and Board believe that the stockholder proposal mischaracterizes the company's relationships with the Indonesian government and the security of the company's operations)". Proposal tidak diterima.⁵⁷

Yayasan Pensiun Kota New York menyiapkan kembali proposal lain untuk rapat umum tahunan selanjutnya yaitu di bulan Mei 2005. Proposal ini kembali ke tema resolusi 2003, yang meminta Freeport McMoRan untuk meninjau kembali kebijakannya atas pembayaran terhadap aparat keamanan Indonesia dan melaporkannya kepada pemegang saham atas tinjauan ini pada bulan September 2005. Sekali lagi proposal ini tidak diluluskan oleh para pemegang saham.⁵⁸

Secara ringkas, kematian tiga karyawan perusahaan pada bulan Agustus 2002 telah membuat beberapa pemegang saham Freeport McMoRan cukup prihatin atas hubungan perusahaan dengan TNI sehingga mengangkat masalah tersebut tiga tahun berturut-turut. Para pemegang saham ini menyebut laporan media yang menduga pembunuhan tersebut mungkin ada hubungannya dengan "pemerasan" terhadap Freeport oleh anggota TNI dan membuat mereka prihatin, karena dipandang dari sudut laporan ini, bahwa pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan kepada anggota TNI mungkin dapat dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang Praktek Korupsi Luar Negri.

Menjawab hal itu, Freeport McMoRan membantah dugaan

pemerasan dan korupsi, kemudian menyebutkan bermacam-macam kebijakan dan proses yang telah dibuat untuk mencegah pelanggaran Undang-Undang Praktek Korupsi Luar Negri dan mengeluarkan informasi lebih rinci mengenai pembayarannya kepada jasa keamanan yang diberikan oleh pemerintah di Indonesia. Pernyataan publik oleh Freeport McMoRan ini diberikan oleh pengacara perusahaan, dalam surat mereka kepada SEC, sebagai bagian dari bukti bahwa perusahaan telah menjawab keprihatinan yang diutarakan oleh pemegang saham.

Masalahnya, sejauh apa yang dapat ditunjukkan oleh laporan ini, adalah apa yang tidak diperlihatkan oleh Freeport

"Tentara Freeport"

Global Witness menanyakan kepada Freeport McMoRan jika biaya keamanan memang diwajibkan oleh hukum Indonesia atau merupakan syarat kontrak karya. Perusahaan menjawab: "Atas permintaan pemerintah [Indonesia], kami memberikan bantuan keuangan untuk memastikan bahwa pasukan keamanan pemerintah Indonesia (TNI dan Polri) memiliki dana yang cukup dan layak untuk dapat memberikan jasa keamanan bagi operasi kami."

Freeport McMoRan juga mengatakan: "Melanjutkan pernyataan pemerintah [Indonesia] bahwa perusahaan kami adalah obyek vital negara, TNI dan Polri memberi jasa keamanan bagi operasi tambang kami di daerah yang terpencil dan dari segi logistik sangat sulit daerahnya. Keamanan sangat diperlukan bagi keberlanjutan keselamatan tenaga kerja kami dan keluarga mereka, serta untuk perlindungan fasilitas kami. Tidak ada alternatif lain bagi kami untuk menggantungkan masalah keamanan dan keselamatan selain kepada TNI dan Polri."

Rio Tinto telah menulis pernyataan yang agak berbeda di situasinya yaitu: "pemerintah [Indonesia] mengharapkan Freeport untuk dapat menyediakan bantuan logistik dan infrastruktur serta dana tambahan bagi jasa keamanannya. Rio Tinto percaya biaya semacam itu diwajibkan secara hukum dan sah."⁵⁹ Global Witness menanyakan kepada Rio Tinto untuk menunjukkan hukum yang mana yang menyatakan bahwa hal ini "diwajibkan secara hukum". Rio Tinto menolak menjawab pertanyaan ini.

TNI memberikan pendapat lain mengenai pembayaran ini, setelah hal itu dinyatakan oleh Freeport McMoRan kepada publik pada bulan Maret 2003. Panglima TNI, Jendral Endriartono Sutarto, ditanya oleh wartawan lokal apakah

Serangan Bulan Agustus 2002

Pada tanggal 31 Agustus 2002, sekelompok guru dari kota Freeport Tembapapura dalam perjalanan pulang dari sebuah piknik di hutan dengan kendaraan, ketika dengan tiba-tiba beberapa orang bersenjata menyerang mereka. Tiga orang tewas ditembak yaitu: Dua warganegara Amerika Rick Spier dan Edwin Burgon, serta seorang Indonesia, Bambang Riwanto. Sebelas orang lainnya luka-luka sebelum kelompok bersenjata tersebut mundur. Mereka digambarkan oleh yang selamat sebagai orang-orang Papua yang mengenakan rupa-rupa seragam militer.

Pertanyaan tentang siapa yang merencanakan dan melakukan serangan tersebut telah mempengaruhi hubungan diplomatik AS – Indonesia dan membuat kontroversi panjang mengenai hubungan antara Freeport dan aparat keamanan Indonesia. Para pengamat segera melihat bahwa orang-orang bersenjata tersebut mampu melakukan penyerangan walaupun lokasinya dekat dengan dua pos TNI. TNI menuduh kelompok pemberontak OPM, Organisasi Papua Merdeka.¹ Sebuah kelompok HAM Papua, Elsham (Lembaga Studi dan Advokasi HAM) mengatakan komandan OPM setempat, Kelly Kwalik, bulan Agustus sebelumnya mengancam akan menyerang Freeport, namun membatalkan ancamannya atas desakan kelompok masyarakat sipil Papua. Elsham menuduh TNI berada di belakang serangan.²

Kemudian sebuah laporan awal berisi penyelidikan Polri tentang serangan tersebut bocor ke media dalam bentuk naskah. Dokumen ini, semenjak masuk ke catatan Kongres AS, telah menjadi sumber kontroversi abadi, karena dalam laporan tersebut dinyatakan: “Ada kemungkinan kuat bahwa kasus Tembapapura di lakukan oleh anggota TNI. Tetapi, masih diperlukan penyelidikan lebih lanjut.”³

Laporan Polri menyebutkan bahwa kelompok OPM yang kekurangan perbekalan, jarang menggunakan banyak amunisi dalam serangannya, dan menyebut kecemburuan tentara terhadap gaji yang lebih tinggi yang diberikan kepada karyawan Freeport. Laporan tersebut juga menyinggung mayat seorang laki-laki Papua yang ditemukan di dekat lokasi kejadian. TNI menyatakan mereka telah menembak laki-laki ini karena ia adalah salah satu dari penyerang, namun sebuah otopsi menunjukkan bahwa ia telah tewas sehari sebelum kejadian dan menemukan bahwa laki-laki itu memiliki kondisi medis yang serius (pembengkakan buah zakar yang diakibatkan oleh penyakit gajah) yang berarti ia tidak mungkin ambil bagian dalam penyerangan. Polri berpikir mayatnya telah diletakkan dengan sengaja di lokasi kejadian. Inti laporan Polri adalah pengakuan dari seorang informan Papua

bernama Decky Murib, yang bekerja untuk Kopassus. Murib mengatakan ia berada di lokasi yang sama hari itu dengan seorang perwira Kopassus yang diidentifikasi dalam laporan tersebut sebagai “Letnan Satu Markus”, belakangan media lokal melaporkan nama perwira tersebut sebagai Kapten Margus Arifin, dan sebuah tim tentara pasukan khusus. Polri tidak mengatakan para tentara ini yang melakukan penyerangan, tapi berspekulasi bahwa mereka berencana untuk membunuh Murib dan membuatnya tampak sebagai salah satu penyerang.

Kapolda Papua, I Made Pastika, kemudian dipindahkan untuk memimpin penyelidikan Bom Bali Oktober 2002 yang kemudian sukses. Wakilnya, yang di depan umum telah menuduh TNI sebagai pelaku penyerangan, dipindahkan untuk bertugas di belakang meja di Jakarta. Elsham dituntut oleh TNI atas tuduhan memfitnah, dan kantor mereka di rampok oleh sekelompok preman tak dikenal. Decky Murib sendiri kabur, kemudian menarik kembali pengakuannya, dan mengatakan bahwa ia disuruh oleh Elsham.⁴ Sebuah tim penyelidikan gabungan antara Polri dan TNI tidak menemukan bukti atas pernyataan Murib. Seorang pejabat senior dilaporkan mengatakan Kapten Arifin pada saat kejadian berada di daerah lain di Indonesia.⁵ Polri sendiri kemudian mundur dari kesimpulan awal mereka, dan menyatakan kelompok pemberontak OPM, bukan TNI, yang bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Tetapi serangkaian artikel media internasional melaporkan bahwa pejabat AS mencurigai TNI terlibat dalam penyerangan. Pada bulan November 2002, “seorang sumber yang dekat dengan Kedubes AS” di Jakarta mengatakan kepada surat kabar Australia, Sydney Morning Herald, bahwa: “[pejabat AS] tahu bahwa pembunuhan dua warga negara Amerika diprakarsai oleh Kopassus, tetapi mereka hanya mengerami saja informasi itu, karena akan merugikan kepentingan mereka yang lebih besar.”⁶ Pada bulan yang sama, Washington Post, menulis dugaan bahwa perwira senior Indonesia sudah tahu sebelumnya mengenai penyerangan tersebut, tetapi kemudian surat kabar tersebut menarik dugaannya.⁷

Pada bulan Januari 2003, reporter harian New York Times melaporkan “seorang pejabat administrasi” mengatakan: “Tidak ada keraguan bahwa ada keterlibatan TNI. Tidak ada keraguan (serangan) itu telah direncanakan sebelumnya.” Tulisan ini juga mengutip seorang “Analisis Intelijen dari Barat” yang mengatakan bahwa ia percaya motif serangan tersebut adalah “pemerasan, murni dan simpel.”⁸ Kedubes AS di Jakarta membantah tulisan

tersebut dan menyatakan bahwa pemerintah AS “belum sampai pada kesimpulan apapun” atas kasus ini.⁹ Bantahan tersebut tidak menghentikan harian New York Times untuk menulis kembali pernyataannya seminggu kemudian.¹⁰

Pada bulan Maret 2003, Matthew P. Daley, Sekretaris Asisten Deputi di Departemen Luar Negeri, Biro Masalah Asia Timur dan Pasifik, memberitahukan kepada Senat AS bahwa: “Walaupun sejumlah besar bukti kelihatannya mengindikasikan bahwa ada elemen TNI yang bertanggung jawab atas tindak kejahatan tersebut, kita belum dapat membuat keputusan pasti sampai seluruh proses penyelidikan selesai.” Pada bulan Juni 2005, Global Witness menghubungi Daley, yang saat ini tidak lagi bekerja pada pemerintah AS, dan menanyakan apa pendapatnya sekarang. Ia mengatakan: “Perubahan utama dari dua tahun yang lalu yaitu kita memang punya penyelidikan yang dilakukan oleh FBI ... Kita pernah memiliki kerja sama yang berarti dengan FBI dan kasus itu masih terbuka.”¹¹

Federal Bureau of Investigation (FBI) telah memulai penyelidikannya pada bulan Januari 2003, tetapi karena kelihatannya pihak Indonesia gagal untuk bekerja sama dengan mereka, membuat Kongres AS untuk tetap menunda bantuan militer AS untuk Indonesia. Yang mana Anggota Kongres Joel Hefley kemudian membawa amandemen pada bulan Juni 2003 yang menyebutkan bahwa: “Tidak mengejutkan, bahwa TNI telah membebaskan diri dari tuduhan. Pada dasarnya, tim penyidik Amerika, termasuk FBI, tidak dapat menyelesaikan penyelidikan mereka karena penolakan TNI untuk bekerja sama dan usahanya merusak barang bukti.”¹²

Pada bulan Maret 2004, Associated Press melaporkan bahwa pejabat AS percaya serangan tersebut dilakukan atas perintah komandan TNI setempat. Laporan tersebut mengutip “seorang pejabat senior AS yang dekat dengan penyelidikan” mengatakan: “Ini bukan lagi pertanyaan siapa yang melakukan. Tapi setinggi apa dalam rantai komando yang terlibat.”¹³ Laporan tersebut menambahkan: “Dibawah empat mata, pejabat AS mengatakan tidak ada keraguan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas penyerangan tersebut.”¹⁴ Kedubes AS di Jakarta nampaknya membantah laporan itu.

Perkembangan besar selanjutnya yaitu terjadi di bulan Juni 2004 ketika Juri Agung AS mengajukan dakwaan terhadap seorang Papua bernama Anthonius Wamang “dan yang lainnya, yang diketahui dan tidak, oleh Juri Agung” atas pembunuhan Rick Spier

dan Edwin Burgon dan percobaan pembunuhan terhadap delapan orang warga negara Amerika lainnya.¹⁵ Wamang belum ditahan dan keberadaannya pun masih belum diketahui, tetapi ia telah memberikan wawancara dengan sebuah media Australia, dan kepada media tersebut ia menyatakan bahwa ia adalah anggota kelompok pemberontak OPM. Ia mengakui ikut terlibat dalam serangan karena ia pikir penumpang dalam kendaraan tersebut adalah anggota TNI yang sering menggunakan kendaraan Freeport, dan mengatakan bahwa dalam melakukan serangan tersebut, ia telah menentang perintah Kelly Kwalik, pimpinan OPM. Pada wawancara yang sama, Wamang mengakui bahwa ia melakukan bisnis dengan anggota TNI dan menggunakan uangnya untuk membeli amunisi.¹⁶

Pada bulan Februari 2005, Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice memutuskan bahwa Indonesia telah bekerja sama dengan cukup baik dengan FBI sehingga penahanan pelatihan militer AS sudah dapat diangkat. Pada bulan Mei 2005 wakil Rice, Robert Zoellick, mengatakan kepada wartawan ketika berkunjung ke Indonesia bahwa: “Kecurigaan awal yaitu pada TNI, tetapi penyelidikan ... tidak menunjukkan ke arah TNI. Sebaliknya menunjukkan – Wamang malah ada di TV Australia, Masya Allah ... Maksud saya dan saya rasa tak seorangpun tahu secara pasti bahwa dia punya hubungan dengan TNI.”¹⁷

Kenyataan bahwa Wamang adalah seorang Papua tidak membuktikan atau menyangkal kemungkinan bahwa aparat keamanan terlibat dalam penyerangan. Seperti yang ditunjukkan oleh apa yang terjadi di Timor Timur, TNI telah menggunakan kelompok milisi lokal pada masa lampau untuk melaksanakan operasi rahasia “yang dapat disangkal”. Tetapi tidak selalu jelas, sejauh mana kendali yang dimiliki oleh kepemimpinan TNI atau Polri terhadap bawahan mereka di lapangan. Dan mungkin juga Wamang menyatakan kebenaran, bahwa ia tidak memiliki hubungan dengan aparat keamanan pada saat penyerangan, dan ikut ambil bagian dalam serangan tersebut dengan alasan yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Kemungkinan kebenaran akan sulit dicapai, kecuali ada pengadilan yang adil dan terbuka bagi Wamang.

Hampir tiga tahun setelah serangan fatal bulan Agustus 2002, masih belum jelas siapa yang merencanakan pembunuhan, siapa yang melaksanakan dan mengapa. Hingga pertanyaan-pertanyaan ini dapat dipecahkan, pertanyaan lain yang sangat penting belum dapat dijawab, yaitu: apakah TNI dan Polri memberikan keamanan kepada Freeport, atau ketidakamanan?

pembayaran oleh Freeport Indonesia tersebut akan terus berlanjut. Menurut laporan, Jendral Sutarto menjawab: "Saya tidak tahu, tanyakan saja kepada Freeport. Kita tidak memaksa Freeport untuk melakukan hal itu (melakukan pembayaran). Terserah Freeport, mau diteruskan atau tidak ... Kita tidak dapat memberikan tambahan uang kepada mereka (tentara) yang bertugas disana, jadi kalau ada seseorang yang punya niat baik ingin membantu, mengapa tidak?"⁶⁰ Laporan ini menunjukkan bahwa TNI menganggap pembayaran ini sebagai tanda niat baik secara sukarela dari Freeport. Global Witness menulis surat kepada Jendral Sutarto pada bulan Juni 2005 dan meminta beliau untuk mengkonfirmasi bahwa itu adalah pendapatnya pada saat itu. Hingga saat ini beliau belum menjawab.

Ringkasnya, Freeport McMoRan mengatakan pemberian uang tersebut adalah "diminta" oleh pemerintah Indonesia. Rio Tinto mengatakan mereka "diharuskan secara hukum". Sementara Panglima TNI dilaporkan menyatakan bahwa pembayaran tersebut adalah "bantuan" dari "seseorang yang punya niat baik." Kekurang jelasan ini membingungkan.

Reaksi masyarakat Indonesia atas penyingkapan oleh Freeport McMoRan di bulan Maret 2003 menunjukkan bahwa, pembayaran itu sama sekali tidak dianggap sebagai sebuah pemenuhan kewajiban hukum atau kontrak, melainkan dianggap sebagai hal yang kontroversial. Reformis Indonesia melihat ini sebagai bukti bahwa TNI beresiko jatuh dibawah pengaruh perusahaan swasta. Surat kabar Jakarta Post, sebuah harian yang liberal, menulis: "untuk 5,6 juta dollar AS setahun, tentara yang ditugaskan disekitar Freeport mungkin bisa menyebut diri mereka sebagai Tentara Freeport ... Jika praktek seperti ini dimaafkan, kita hanya akan berada selangkah dari pemerasan. Ini membuat TNI tidak jauh berbeda dengan preman yang menjalankan hampir seluruh usaha pemerasan di negri ini. Lebih buruk lagi, hal ini menimbulkan pertanyaan, kepada siapa TNI setia: kepada rakyat dan negara, atau kepada pemilik modal?"⁶¹

Pendapat yang sama juga dilontarkan oleh Almarhum Munir Said Thalib, salah seorang pejuang HAM di Indonesia, yang dikutip mengatakan bahwa pejabat senior kelihatannya tidak mampu mengendalikan apa yang dilakukan bawahan mereka. "TNI telah turun martabatnya menjadi sekelompok paramiliter yang dibayar untuk melindungi kepentingan Freeport."⁶² Munir dibunuh bulan September 2004. Tim Pencari Fakta yang dibentuk oleh pemerintah menyimpulkan pada bulan Juni 2005 bahwa BIN "diduga ikut terlibat dalam sebuah konspirasi untuk membunuh" Munir.⁶³ Tidak ada bukti mengenai hubungannya dengan Papua.

Reaksi pimpinan TNI terhadap berita dari Freeport diliput

secara luas oleh media lokal pada bulan Maret 2003. Liputan media menggambarkan tema yang sama dalam berbagai reaksi dari perwira TNI: pembayaran-pembayaran tersebut hanya dalam jumlah kecil, untuk tujuan terbatas dan langsung diberikan kepada tentara yang bertugas di Papua, bukan kepada pimpinan TNI. Jelas bahwa para perwira senior sangat sensitif terhadap kesan bahwa TNI mungkin dibayar oleh perusahaan asing.

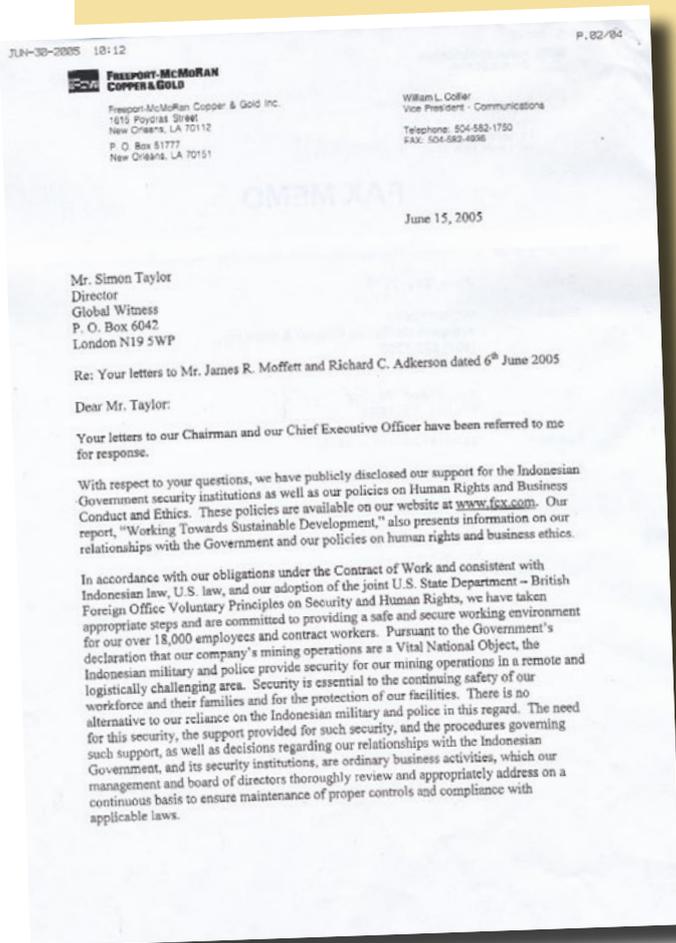
Reaksi awal Panglima TNI, Jendral Endriartono Sutarto, seperti dikutip oleh Kantor Berita Antara pada tanggal 14 Maret 2003, mengatakan: "Jika laporan tersebut benar, kami akan mencari klarifikasi tentang hal itu karena sejauh yang saya tahu, tentara kita hanya menerima uang saku dan uang makan."⁶⁴ Pada tanggal 24 Maret 2003, seperti yang disebutkan sebelumnya, Jendral Sutarto mengatakan kepada wartawan bahwa TNI tidak pernah memerintahkan Freeport untuk memberi sejumlah uang dan terserah kepada perusahaan untuk meneruskan atau tidak. Menurut beberapa laporan media, Jendral Sutarto mengatakan pembayaran itu untuk akomodasi, perbaikan alat dan perlengkapan, serta uang saku untuk tentara yang gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka di Papua. Menurut Antara, Jendral Sutarto menambahkan: "Karena itu, dugaan bahwa TNI telah menerima uang keamanan dari Freeport Indonesia ... jelas tidak benar."⁶⁵

Jendral Sutarto ditanya oleh wartawan untuk mengkonfirmasi berapa jumlah uang yang diberikan kepada TNI oleh Freeport. Salah satu media mengutip beliau: "Tanyakan kepada Freeport, saya tidak pernah melihat uangnya dan tidak pernah mengajukan jumlah. Uangnya langsung diberikan kepada para tentara."⁶⁶ Global Witness menulis surat kepada Jendral Sutarto dan berusaha mengkonfirmasi kepada beliau apakah itu memang pendapatnya di bulan Maret 2003. Sampai saat ini Jendral Sutarto belum menjawab.

Juga di bulan Maret 2003, Kepala Staff TNI Angkatan Darat, Jendral Ryamizard Ryacudu, dikutip oleh koran lokal: "Setahu saya, prajurit saya hanya menerima Rp 125,000 per bulan. Mungkin untuk makannya gratis. Itu aja. Ndak tahu saya soal dana itu. Satu sen pun saya nggak pernah dikasih."⁶⁷ Ryacudu juga dikutip mengatakan: "berbagai isu yang dilontarkan oleh kelompok-kelompok yang jelas memusuhi negara seperti penembakan terhadap orang-orang asing di Timika dan yang terbaru adalah TNI dikabarkan menerima uang dalam jumlah sangat besar dari PT Freeport di Timika, adalah fitnah-fitnah dan isu-isu kampungan dan akan terus disebar untuk mendiskreditkan TNI agar opini terbentuk baik di dalam negeri terutama di luar negeri, bahwa TN melakukan kesalahan yang fatal."⁶⁸

Apa yang dikatakan oleh Freeport McMoRan ...

Pada bulan Juni 2005, Global Witness mengirim surat berisi 73 pertanyaan kepada Freeport McMoRan mengenai hubungannya dengan TNI dan Polri. Freeport menjawab sebagai berikut:



... dan yang tidak dikatakan.

Global Witness merasa kecewa dan prihatin karena Freeport McMoRan menolak untuk menjawab secara riil hampir seluruh pertanyaan yang diberikan. Diantaranya, perusahaan tidak menjelaskan:

- Kepada siapa pembayaran jasa keamanan kepada TNI dan Polri sebenarnya dibayarkan.
- Mengapa kelihatannya sebagian dari pembayaran tersebut diberikan kepada individu, bukan kepada institusi pemerintah.
- Bagaimana perusahaan menentukan bahwa pembayaran tersebut tidak disalahgunakan oleh penerima.
- Bagaimana perusahaan mengetahui jika pembayaran tersebut tidak digunakan untuk membiayai operasi TNI melawan gerakan kemerdekaan Papua.
- Bagaimana perusahaan memastikan bahwa pembayaran tersebut tidak menguntungkan orang-orang yang dicurigai terlibat pelanggaran HAM.

Komentar Ryacudu tentang “penembakan warga negara asing” hampir pasti merujuk ke laporan media yang mengesankan keterlibatan TNI dalam kasus pembunuhan tiga orang guru di bulan Agustus 2002, karena tidak ada penembakan lain terhadap warga negara asing di Timika beberapa tahun sebelumnya. Global Witness menulis surat kepada Ryacudu dan menanyakan kepada beliau tentang hal ini. Sampai saat ini beliau belum menjawab.

Wartawan Indonesia juga menanyakan mengenai pemberian setoran kepada Mayor Jendral Mahidin Simbolon, Pangdam TNI di Papua. Dua buah surat kabar mengutip Simbolon yang mengatakan bahwa prajuritnya menerima 125,000 rupiah setiap bulan tiap orangnya, jumlah yang sama yang disebutkan oleh Ryacudu.

Salah satu surat kabar ini melaporkan bahwa wartawan menanyakan kepada Simbolon untuk mengkonfirmasi

angkar 50 milyar rupiah, kurang lebih jumlah yang sama dengan 5,6 juta dollar AS yang di utarakan oleh Freeport McMoRan di AS. Surat kabar tersebut mengutip Simbolon: “Kalau uang itu saya dapat, saya bagi-bagi termasuk sama kalian wartawan. Saya juga bangun hotel untuk tempat tinggal prajurit. Kalian lihat sendiri kondisi rumah prajurit saya. Masa’ saya tega, kalau ada uang sebesar itu tidak saya gunakan untuk membangun rumah prajurit saya?”⁶⁹ Simbolon juga mengatakan kepada Global Witness pada bulan Juni 2005, bahwa Freeport Indonesia memberi sejumlah uang untuk makanan bagi tentara yang bertugas menjaga keamanan di sekitar tambang, namun ia sendiri belum pernah menerima uang apapun dari perusahaan.⁷⁰

Kelihatannya Sutarto atau Ryacudu tidak menerima uang dari Freeport dan tidak ada alasan untuk tidak percaya bahwa pernyataan mereka kepada wartawan pada bulan Maret 2003 adalah apa yang mereka ketahui pada saat itu. Tetapi Mahidin Simbolon adalah cerita lain.

Uang Makan Jendral Simbolon

Mayor Jendral Mahidin Simbolon adalah seorang veteran Kopassus, yang bertugas sebagai pelaksana kekuasaan untuk rejim Soeharto. Anggota Kopassus sudah sejak lama dihubungkan dengan pembunuhan, penyiksaan dan perlakuan kejam lain atas warga sipil di daerah konflik. Global Witness tidak mengatakan bahwa Simbolon secara pribadi melakukan perlakuan kejam semacam itu (lihat boks: Mahidin Simbolon di Timor Timur dan Papua, halaman 20).

Simbolon bertugas di Timor Timur beberapa kali. Pada pertengahan tahun 90-an, prajurit yang berada di bawah komandonya melatih sejumlah kelompok milisi lokal untuk memerangi mereka yang pro-kemerdekaan. Pada tahun 1999, beliau bertugas sebagai Kepala Staff Kodam [IX/Udayana] yang mengatur pasukan di Timor Timur. Di tahun 1999, tentara dan kelompok milisi melakukan kampanye pembunuhan massal dan teror dalam usaha menghentikan Timor Timur terpisah dari Indonesia. Kampanyenya gagal, namun itu setelah menelan korban tidak kurang dari 1,200 orang Timor Timur dan meninggalkan sebagian besar dari negara tersebut dalam kehancuran.

Para pemimpin Timor Timur menuduh Simbolon sebagai salah satu dari penggerak utama kampanye kekerasan ini, tetapi tidak seperti perwira TNI lain yang disebutkan oleh para pemimpin ini, Simbolon tidak pernah dituntut di negara manapun sehubungan dengan peristiwa tahun 1999. Ia mengatakan kepada Global Witness pada bulan Juni 2005 bahwa ia memang mengenal pimpinan kelompok milisi, seperti juga ia mengenal tokoh pejuang kemerdekaan Xanana Gusmao, yang ia tangkap pada awal tahun 90-an dan sekarang menjadi Presiden Timor Timur, yang saat itu sudah bernama Timor Leste.

Pada bulan Januari 2001, Simbolon tiba di Papua untuk memimpin komando militer Indonesia disana. Tidak ada alasan untuk mengatakan Freeport bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh Simbolon sebelum hubungannya dengan Freeport. Tetapi berdasarkan informasi yang dapat diakses oleh umum pada tahun 2001, cukup dapat dilihat bahwa ia adalah seorang perwira yang kontroversial dengan sebuah tanda tanya besar atas hubungan dan kegiatannya di Timor Timur, dan bahwa sebuah perusahaan yang masuk kedalam hubungan apapun dengannya, harus sangat berhati-hati.

Global Witness mempelajari bahwa ada serangkaian pembayaran yang terjadi antara bulan Mei 2001 dan Maret 2003, dengan jumlah total sebesar 247,705 dollar AS, yang kelihatannya diberikan oleh Freeport Indonesia kepada Simbolon. Pembayaran tersebut antara lain:

- Pembayaran senilai 47,568 dollar AS di bulan Mei 2001, dijelaskan oleh Freeport Indonesia untuk pembangunan rumah sakit TNI di Jayapura;
- Pembayaran senilai 64,655 dollar AS di bulan Mei 2002, dijelaskan untuk sebuah proyek militer;
- Pembayaran senilai 10,000 dollar AS di bulan Juli 2002, dijelaskan untuk perayaan ulangtahun Kodam Trikora;
- Pembayaran senilai 67,682 dollar AS di bulan Desember 2002, dijelaskan untuk sebuah proyek kemanusiaan;
- Pembayaran bulanan senilai 57,800 dollar AS total, antara bulan Juni 2001 dan Maret 2003. Pembayaran bulan Juli 2001 disebutkan sebagai jasa keamanan, sementara bulan Januari hingga Maret 2003 disebutkan sebagai biaya administrasi. Pembayaran bulanan yang lain disebutkan sebagai uang makan.

Dengan perkecualian dua buah pembayaran bulanan yang terjadi di tahun 2003, kelihatannya penerima pembayaran ini bukanlah pemerintah Indonesia, melainkan Mahidin Simbolon sendiri. Freeport Indonesia kelihatannya juga telah membayar sebesar 25,000 dollar AS kepada pihak ketiga untuk pengeluaran Simbolon dan istri, termasuk 7,000 dollar AS untuk biaya hotel dan lebih dari 16,000 dollar AS untuk biaya lain, sebagian besar kelihatannya untuk biaya perjalanan.

Global Witness menulis surat kepada Freeport McMoRan dan menyebutkan bahwa pembayaran sejumlah uang kelihatannya telah diberikan kepada Simbolon oleh Freeport Indonesia, dan meminta perusahaan induk untuk menjelaskan. Perusahaan menolak untuk menjawab pertanyaan ini. Global Witness juga menghubungi Simbolon, yang saat ini berpangkat Inspektur Jendral Angkatan Darat [Irijenad], dan meminta tanggapannya atas pembayaran yang tampaknya telah diberikan kepadanya. Jawabannya: "Setahu saya tidak ada begitu dari PT Freeport. Nggak ada"

Simbolon mengatakan tentara yang menjaga tambang Freeport menerima uang makan, namun uang tersebut "langsung ke pasukan" dan ia belum pernah menerima pembayaran apapun. Global Witness juga menulis surat kepada Panglima TNI, Jendral Sutarto, dan meminta beliau untuk menanggapi tentang pembayaran yang diberikan kepada Simbolon dan perwira lain yang disebutkan oleh laporan ini. Sampai laporan ini keluar ke media, Jendral Sutarto belum menjawab.

Indonesia adalah negara berkembang yang standar kehidupan dan upah pekerjaannya jauh lebih rendah daripada mereka yang hidup di negara maju. Gaji pokok seorang Mayor Jendral sekitar 200 dollar AS per bulannya di pertengahan tahun 2000, walaupun untuk seorang perwira yang ditugaskan di Papua angka ini akan ditambah dengan tunjangan daerah terpencil.⁷¹ Jadi, Simbolon kelihatannya telah menerima uang bulanan dari Freeport Indonesia, kabarnya hanya untuk uang makan, yang jumlahnya mungkin jauh lebih besar dari pada gaji pokok yang diterimanya dari pemerintah. Dan bahkan tampaknya ia telah menerima jumlah yang jauh lebih besar untuk maksud lain.

Freeport Indonesia telah melakukan banyak pembayaran kepada institusi pemerintah Indonesia selama bertahun-tahun, seperti kepada Kodam Trikora. Karena itu, mengapa di negara yang terkenal korup, nampaknya Freeport membayar hampir seperempat juta dollar AS kepada seorang pejabat publik senior, bukannya kepada institusi pemerintah dimana dia bekerja, apalagi pejabat yang memiliki rekor cukup kontroversial?

Mahidin Simbolon di Timor Timur Dan Papua

Mahidin Simbolon lulus dari Akabri tahun 1974.¹ Ia menghabiskan sebagian besar dari karir militernya di Kopassus, pasukan khusus Indonesia, termasuk beberapa masa penugasan di Timor Timur, dimana pada tahun 1992, ia ikut ambil bagian dalam penangkapan pemimpin gerilya Timor Timur yaitu Jose Alexandre "Xanana" Gusmao.² Xanana bertahan dari hukuman penjara yang cukup lama, dan menjadi Presiden negara berdaulat Timor Timur, yang sekarang dikenal sebagai Timor Leste.

Kekuasaan Indonesia di Timor Timur dicirikan dengan digunakannya taktik teror terhadap pendukung kemerdekaan, termasuk pembunuhan massal, penyiksaan, perkosaaan dan pengerahan paramiliter lokal melawan sesama orang Timor Timur. Perwira Kopassus dan intel militer memegang peranan cukup besar dalam masa pendudukan. Antara tahun 1995 dan 1997, Simbolon memimpin Komando Resor Militer di Timor Timur, Korem 164. Amnesty International menyebutkan: "penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap tahanan politik di Timor Timur adalah suatu hal yang rutin," dalam sebuah laporan yang dipublikasikan pada bulan Januari 1996 yang menyebutkan dugaan bahwa para tahanan disiksa oleh intel militer dari Korem 164.³ Laporan Amnesty tidak menyebut Simbolon dalam konteks ini.

Korem 164 juga mengawasi latihan kelompok paramiliter setempat yang disebut Gada Paksi. Seakan-akan, Gada Paksi adalah sebuah rencana penciptaan lapangan kerja untuk pemuda Timor Timur, padahal sebenarnya adalah sumber tenaga preman bagi TNI untuk dikerahkan melawan pendukung kemerdekaan, dan pelopor kelompok milisi yang meneror Timor Timur di tahun 1999. TNI sudah sering merekrut kelompok milisi semacam ini dari penduduk setempat di daerah konflik, namun biasanya TNI menggambarkan mereka sebagai relawan yang maju ke depan untuk membela komunitas mereka, bukannya sebagai pasukan pembantu bayaran. Tidak seperti kelompok milisi Timor Timur yang lain, Gada Paksi bukan unit tempur dan biasanya tidak dipercaya membawa senjata.

Global Witness memiliki kopi laporan rutin TNI tentang kegiatan Gada Paksi di minggu 19-24 Februari, 1996. Laporan tersebut menjelaskan mengenai status pekerjaan anggota Gada Paksi yang berjumlah 399 orang dan merekomendasikan TNI untuk melakukan usaha lebih untuk dapat mencarikan mereka pekerjaan. Laporan itu ditujukan kepada seorang mayor Kopassus oleh seorang Kapten Kopassus. Kop suratnya menunjukkan bahwa perwira tersebut bertugas di Korem 164, yang pada saat itu berada di bawah Komando Simbolon. Juga ada daftar anggota

Gada Paksi. Nomor satu dalam daftar yaitu “Eurico Guterres”. Kelihatannya ini Eurico Guterres, seorang preman jalanan yang dikenal memimpin Gada Paksi dan kemudian dikenal luas sebagai ketua kelompok milisi (lihat bawah).

Pada tahun 1998, setelah Simbolon meninggalkan Timor Timur, Presiden Soeharto jatuh dari kekuasaan. Penggantinya, B.J. Habibie, secara tak dinyana menawarkan kepada Timor Timur sebuah referendum untuk menentukan apakah mereka ingin tetap menjadi bagian dari Indonesia atau berdiri sendiri. TNI dan sekutunya mulai memastikan orang-orang Timor Timur memilih jalan yang benar. Mereka memanfaatkan kelompok milisi untuk meneror penduduk untuk memilih tetap bergabung dengan Indonesia, bahkan walaupun staff PBB berada di wilayah tersebut untuk menyiapkan pemungutan suara pada saat itu.

TNI mengorganisir dan memimpin kelompok milisi, dan memberi mereka senjata, dana, transport dan latihan, dan menugaskan para prajurit untuk bergabung atau membantu kelompok milisi melakukan serangan. Polri juga terlibat kegiatan kelompok milisi, atau membiarkannya berlangsung. Walaupun selama beberapa bulan terjadi pembunuhan dan teror, referendum tetap dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999, dengan hasil mayoritas memilih pisah dari Indonesia. TNI dan kelompok milisi melakukan aksi balas dendam dengan menghancurkan kota-kota dan dan memaksa ratusan ribu orang pindah ke tempat penampungan sementara di Timor Barat. Paling sedikit, 1,200 rakyat sipil kemungkinan terbunuh oleh tentara dan kelompok milisi dalam peristiwa ini.⁴

Pada tahun 1999, Simbolon berpangkat Brigadir Jendral dan bertugas di Bali sebagai Kepala Staff Kodam Udayana yang markasnya berpusat di Bali, tetapi juga mengkomandoi pasukan yang ada di Timtim. Pangdamnya pada waktu itu atasan Simbolon langsung, yaitu Mayor Jendral Adam Damiri. Global Witness memiliki kopi surat perintah yang di tandatangani oleh Simbolon atas nama Damiri. Perintah ini menunjukkan bahwa Simbolon berada dalam rantai komando dari Bali sampai Timor Timur, namun hal ini tidak membuktikan adanya hubungan langsung dengan kelompok milisi dan juga melibatkannya secara pribadi dalam pelanggaran HAM. Dokumen ini diberikan kepada Global Witness oleh Yayasan HAK, sebuah kelompok HAM di Timor Timur.

Sementara, sikap angkuh dan pidato yang haus darah telah membuat Eurico Guterres menjadi sangat dikenal diantara kelompok milisi Timor Timur. Pimpinan kelompok milisi yang lain yang juga terkenal kejam yaitu Cancio de Carvalho, yang mengumbar kepada wartawan asing pada awal tahun 1999 bahwa orang-orangnya telah membunuh beberapa orang

penduduk sipil, termasuk seorang wanita hamil.⁵ Nama kelompok milisi yang dipimpin Cancio yaitu ‘Mati Hidup Demi Integrasi’, disingkat Mahidi. Menurut surat kabar Sydney Morning Herald, intel Australia menangkap sebuah percakapan telepon antara Eurico Guterres dan seorang prajurit Kopassus pada tanggal 14 Februari 1999. Guterres memberitahukan bahwa seorang anggota Mahidi terluka. Prajurit tersebut menjawab: “Kami tahu bahwa pak Simbolon prihatin atas terlukanya salah seorang anak buahnya.”⁶

Ketika ditanya oleh Global Witness untuk memberi tanggapan mengenai hubungannya dengan pimpinan kelompok milisi Timor Timur, khususnya de Carvalho dan Guterres, Simbolon menjawab: “Tidak ada hubungan. Kenal, iya. Xanana saja saya kenal. Xanana saya nangkap tapi hidup dia, kan?” Ketika ditanya mengenai laporan di Sydney Morning Herald yang memberi kesan nama kelompok milisi tersebut sebagai tanda penghormatan baginya, Simbolon menjawab dengan balik bertanya, apa dasar laporan tersebut dan berkata : “Itu adalah omongan orang yang tidak adil itu [dan seharusnya] dengan dasar, dengan bukti ... [Di Timor] mereka membuat Mahidi, Mati Hidup Demi Integrasi. Tidak ada hubungan dengan nama saya Mahidin.”⁷

Pada tanggal 6 Agustus 1999, bersamaan dengan semakin meningkatnya aksi kekerasan di Timor Timur menjelang referendum PBB, pemimpin pro-kemerdekaan Gusmao mengatakan kepada TV Portugis: “Masyarakat Internasional seharusnya lebih tahu bahwa ada anggota TNI yang tidak mau proses referendum terjadi. Semua rencana yang mereka buat sejak aksi kekerasan dimulai adalah untuk mencegah proses referendum terjadi, dan mereka akan terus berusaha mencegah itu terjadi. Zacky Anwar [Makarim] ... Adam Damiri dan Simbolon, yang ada di Bali ... mereka harus dipindahkan dari tempat tugas mereka.” Gusmao juga menyebutkan enam orang perwira lainnya yang pangkatnya lebih rendah, semuanya pada saat itu sedang bertugas di Timor Timur.⁸

Pemimpin Timor Timur lain yang mengatakan hal yang sama pada waktu itu yaitu, Jose Ramos-Horta, yang telah memenangkan hadiah Nobel Perdamaian dan sekarang menjadi Menteri Luar Negeri Timor Leste. Ia dikutip oleh media pada tanggal 5 Agustus 1999 dan menyebut Makarim, Damiri, Simbolon dan seorang perwira lain dan mengatakan : “Empat orang ini adalah mereka yang paling bertanggung jawab atas pembunuhan oleh TNI dan kelompok milisi yang terjadi di Timor Timur.”⁹

Zacky Anwar Makarim adalah seorang perwira intel senior, dan seperti Simbolon, pernah bertugas di Timor Timur dan mengenal Gusmao secara pribadi. Majalah Far Eastern Economic Review melaporkan di bulan September 1999 bahwa: “Para diplomat

menggelengkan kepala mereka ketika mengetahui bahwa [Makarim] dan Brigadir Jendral Mahidin Simbolon, dua dari orang-orang yang sangat dekat dengan Timor Timur beberapa bulan belakangan, adalah juga perwira TNI yang paling berpengalaman dalam operasi tersembunyi.” Majalah tersebut menambahkan: “Dapat ditebak, tidak akan lama setelah Gusmao dan sumber diplomat Barat mengatakan Zacky, Simbolon yang bertanggung jawab— yaitu seorang perwira intel terlatih dan anggota pasukan khusus, dan saat ini kepala staff Kodam yang meliputi Timor Timur – dan paling sedikit lima orang komandan lokal ... melakukan kampanye teror yang telah menimbulkan huru hara internasional dan hampir menggagalkan referendum tanggal 30 Agustus.¹⁰

Setelah referendum, TNI dan kelompok milisi mulai menyerang penduduk dan harta milik mereka di Timor Timur. Setelah mendapat tekanan diplomatik yang sangat hebat dan dimuat di halaman depan di media massa internasional, pemerintah Indonesia akhirnya mengizinkan pasukan multinasional untuk datang membantu ke Timor Timur, dan mengakhiri aksi kekerasan. Pada saat itu terjadi, TNI telah memindahkan ratusan ribu rakyat sipil ke pulau Timor Barat [Nusa Tenggara Timur], dimana mereka hidup merana untuk beberapa lama di kamp pengungsi yang dikontrol oleh kelompok milisi. *Janes' Intelligence Review* melaporkan pada bulan November 2000 bahwa Simbolon “telah diidentifikasi oleh sumber intel Barat sebagai mata rantai utama antara TNI dan kelompok milisi Timor Timur.”¹¹

Tidak satupun perwira TNI yang dihukum oleh pengadilan Indonesia atas tindak kejahatannya di Timor Timur tahun 1999. Damiri dinyatakan bersalah karena gagal mencegah anak buahnya melakukan pelanggaran HAM, tetapi keputusan tersebut dibatalkan dalam sidang banding. Simbolon maupun Makarim sama sekali tidak dituntut atas tindak kejahatan apapun di Indonesia. Satu-satunya pimpinan kelompok milisi yang dihukum di Indonesia adalah Eurico Guterres, dan hukumannya dikurangi dalam sidang banding, dari sepuluh tahun menjadi lima tahun. Guterres kemudian pergi ke Timika dekat tambang Freeport di tahun 2003 pada saat kasusnya masih dalam banding, dan mengumumkan rencananya untuk membentuk kelompok milisi untuk memerangi gerakan kemerdekaan Papua. Menurut laporan, rencana ini dihentikan oleh polisi.¹²

Pemerintah AS menyatakan pada tanggal 11 Agustus 2004, setelah sidang banding di pengadilan Indonesia dan telah membatalkan keputusan bersalah yang terakhir, bahwa: “Kami cemas dengan keputusan ini, dan kami kecewa sedalam-dalamnya atas kinerja dan catatan kerja pengadilan Ad Hoc Indonesia ... Kami rasa proses keseluruhan secara serius cacat, dan kredibilitasnya kurang.”¹³ Sebuah tim ahli hukum yang ditunjuk oleh Sekjen PBB Kofi Annan

menyimpulkan bahwa: “Hanya sedikit komitmen untuk melakukan sebuah proses pengadilan yang efektif, yang dikotori oleh banyak kekosongan dalam pelaksanaan penyelidikan, perlindungan saksi dan korban, menampilkan barang bukti yang relevan, kurangnya profesionalisme dan etika serta keteguhan mencari kebenaran dan pertanggung jawaban dari mereka yang bertanggung jawab.” Panel merekomendasikan Indonesia untuk mengadili TNI dan kelompok milisi dalam enam bulan, dibawah pengawasan internasional, atau alternatif lain, kasus tersebut diserahkan kepada Pengadilan Kriminal Internasional di kota Den Haag.

Damiri dan Makarim secara terpisah dituntut atas tindak kejahatan melawan kemanusiaan oleh Unit Tindak Kejahatan Serious PBB di Dili, dalam dakwaan bersama dengan pihak berwenang Timor Timur: tindak kejahatan ini termasuk pembunuhan, deportasi atau pemindahan paksa terhadap sebuah populasi dan penganiayaan.¹⁴ Indonesia menolak untuk menyerahkan perwira TNI kepada Timor Timur untuk diadili disana.¹⁵ Simbolon tidak pernah dituntut di Timor Timur.

Sebuah laporan yang disusun oleh seorang ahli yang independen, yang ditugaskan oleh Kantor Komisi Tinggi PBB untuk HAM, menyebutkan 12 nama perwira aktif maupun bekas perwira senior TNI yang dikatakan “bertanggung jawab merencanakan dan mengkoordinir keseluruhan kebijakan yang menghendaki agar kelompok milisi dimobilisasi dan menggunakan kekerasan terhadap penduduk sipil.” Laporan tersebut menyatakan bahwa para perwira ini: “sangat mungkin terlibat dalam perencanaan tersebut, dan seharusnya menjadi subyek penyelidikan kriminal lebih lanjut.” Keduabelas nama tersebut termasuk Simbolon, Damiri dan Makarim. Laporan tersebut berargumentasi bahwa para perwira ini tidak hanya memiliki tanggung jawab komando atas tindak kejahatan yang dilakukan oleh TNI di Timor Timur, tetapi juga bertanggung jawab secara individu, atas melakukan, memerintah, membujuk orang untuk melakukan, membantu atau sebaliknya memperburuk perbuatan tindak kejahatan serius.¹⁶

Laporan ini tidak dapat diakses oleh umum pada saat Simbolon pindah ke Papua. Tetapi, sudah ada bukti lain yang cukup yang dapat diakses oleh umum pada awal tahun 2001, pada saat Simbolon kelihatannya telah mulai menerima pembayaran dari Freeport Indonesia, untuk menimbulkan keprihatinan yang cukup serius mengenai kegiatannya dan hubungannya dengan peristiwa di Timor Timur dua tahun sebelumnya.

Simbolon Di Papua

Penugasan Simbolon ke Papua dimulai pada bulan Januari 2001. Tokoh politik di Papua pada saat itu adalah Theys Eluay, yang memimpin sebuah gerakan massa pro-kemerdekaan

bernama Presidium Dewan Papua. Eluay diculik pada tanggal 10 November 2001, dalam perjalanan pulang dari sebuah acara di markas Kopassus, dan dibekap hingga tewas oleh penyerangnya. Supirnya sendiri hilang.

Pembunuhan atas tokoh politik terkenal seperti Theys Eluay mengejutkan Papua dan menarik perhatian internasional. Simbolon berulang kali menyatakan bahwa: "Theys meninggal, dan tidak ada indikasi pernah dipukul, ditembak atau dibunuh. Tetapi ia meninggal karena penyakit, yaitu komplikasi jantung." Ketika ditanya apakah Kopassus terlibat atas kematiannya, Simbolon dilaporkan menambahkan: "Itu sama saja dengan mengotori sarang sendiri". Pengamat lain menduga, Eluay adalah korban perseteruan antara orang Papua.¹⁷

Kemudian sebuah penyelidikan yang dilakukan oleh Polri menemukan bahwa pembunuhnya memang anggota Kopassus. Kolonel Hartomo, komandan satuan tugas Kopassus di Papua, dan tiga orang prajurit berpangkat rendah telah dinyatakan bersalah dan dihukum penjara selama tiga tahun setengah atas peranan mereka dalam pembunuhan tersebut.¹⁸ Sebagai perwira militer senior di Papua, Simbolon memiliki komando atas Hartomo dan prajurit lain. Tetapi, ia tidak dituntut atau diadili sehubungan dengan kasus ini. Pada bulan Maret 2002, Simbolon dikutip mengatakan: "Para prajurit ini memang berada dibawah komando saya, tetapi jika ada anggota Kopassus yang terlibat dalam pembunuhan Theys, itu bukan tanggung jawab saya."¹⁹

Global Witness menanyakan kepada Simbolon di bulan Juni 2005, bagaimana bisa prajurit yang berada dibawah komandonya bisa merencanakan dan melakukan pembunuhan terhadap Eluay tanpa sepengetahuannya. Simbolon menjawab dengan menyamakan hubungan antara dirinya dan bawahannya seperti hubungan bapak dengan anaknya: "Kalau anak itu melakukan sesuatu di luar sepengetahuan bapak, bukan atas perintah dari bapaknya..."²⁰

Simbolon tetap memegang komando di Papua bersamaan dengan meluasnya kontroversi segera sesudah penyerangan Agustus 2002. Enam bulan kemudian, yaitu pada bulan Februari 2003, TNI memutuskan untuk mentransfer Simbolon dari Papua, dan ia pindah bulan Maret. Mutasi ini dijelaskan sebagai mutasi rutin, tetapi Associated Press mengutip seorang pejabat TNI senior yang tidak mau disebut namanya yang mengatakan Jendral Simbolon di ganti karena "masalah di Papua".²¹ Tetapi, kemudian Simbolon naik pangkatnya menjadi Inspektur Jendral TNI-AD, salah satu jabatan yang paling tinggi di markas TNI-AD: sampai bulan Juni 2005, dia masih menjabat posisi ini.

Membayar untuk apa sebenarnya?

Global Witness telah menanyakan kepada Freeport McMoRan untuk menjelaskan bagaimana pembayaran kepada aparat keamanan diotorisasi dan dikeluarkan, dan bagaimana pembayaran ini dipertanggungjawabkan; serta audit dan pengawasan seperti apa yang telah diambil, untuk memastikan bahwa pembayaran tersebut tidak disalahgunakan atau digunakan untuk tujuan lain yang berbeda dengan kebutuhan keamanan perusahaan yang sah, seperti membiayai operasi militer melawan gerakan kemerdekaan Papua. Perusahaan tidak memberikan jawaban spesifik terhadap satupun dari pertanyaan-pertanyaan ini, dan hanya mengatakan bahwa dewan dan manajemen mereka sedang "meninjau kembali secara teliti dan menangani sebaik-baiknya hal ini terus menerus". Bantuannya kepada TNI dan Polri "untuk memastikan pemeliharaan kontrol yang tepat, dan kepatutan terhadap hukum yang berlaku" (lihat boks: Yang dikatakan oleh Freeport McMoRan ... dan yang tidak dikatakan, halaman 18).

Freeport McMoRan juga menolak menjawab pertanyaan yang paling penting mengenai pembayaran ini: Kemana sebenarnya pembayaran ini pergi? Global Witness mempelajari bahwa beberapa dari pembayaran ini tampaknya masuk ke unit TNI dan Polri atau markas besar, dan sebagian ke pihak ketiga, seperti hotel dan perusahaan catering untuk membayar pengeluaran yang dilakukan oleh TNI dan Polri. Kelihatannya banyak perwira senior yang menerima sejumlah besar, walaupun tidak sebesar yang diterima oleh Simbolon. Freeport Indonesia juga tampaknya telah memberikan pembayaran dalam bentuk persediaan/perbekalan seperti BBM, dan menyediakan kendaraan yang bisa dipakai di medan apapun, dan transport udara kepada TNI dan Polri.

Pembayaran kelihatannya telah diberikan kepada komando TNI diseluruh Papua, tidak hanya kepada pasukan disekitar tambang. Beberapa dari pembayaran kelihatannya diberikan kepada Kodam, yang letaknya 500 km dari tambang, di kota Jayapura. Komando ini bertanggung jawab atas keseluruhan pasukan di Papua, dan oleh karena itu termasuk juga operasi militer melawan gerakan kemerdekaan Papua. Sebutan resmi daerah militer ini yaitu Kodam XVII/Trikora. Tingkatan yang berada dibawah Kodam yang telah menerima pembayaran di Papua yaitu Komando Resor Militer (Korem 171), berpangkalan di kota Sorong, sekitar 800 km dari tambang ke arah barat laut. Komando ini meliputi bagian barat Papua, termasuk daerah pertambangan Freeport. Daerah terdekat sekitar tambang, menjadi bagian komando dibawahnya, yaitu Komando Distrik Militer (Kodim 1710), yang kelihatannya juga telah menerima pembayaran. Polri juga memiliki struktur komando yang sama,

meskipun kelihatannya pembayaran yang mereka terima lebih sedikit dari TNI.

Disamping tiga tingkatan dari struktur komando TNI ini, Freeport Indonesia kelihatannya juga telah melakukan pembayaran kepada unit yang ditempatkan di daerah sekitar konsesi tambang. Garnisun ini biasanya terdiri dari satu atau lebih batalyon infantri, tim pasukan khusus dari Kopassus, dan bermacam-macam unit yang lain, kadang-kadang termasuk pasukan zeni dan lapis baja, ditambah staff dari TNI-AL dan TNI-AU. Ada juga pasukan dari Brimob, yang dipersenjatai dengan senjata otomatis, dan di daerah konflik mereka sering ditugaskan di garis depan, serta polisi tetap.

Disamping pembayaran langsung, Freeport Indonesia tampaknya juga membayar pihak ketiga untuk biaya-biaya yang dikeluarkan oleh aparat keamanan, seperti biaya tiket pesawat, perawatan kendaraan dan tagihan hotel, serta biaya operasi barak yang dibangun oleh perusahaan untuk TNI. Pembayaran sejumlah uang ini kelihatannya konsisten dengan pernyataan Freeport McMoRan dalam laporan 10-K nya kepada SEC bahwa Freeport Indonesia membayar uang makan, biaya ruang makan, perumahan dan perjalanan kepada TNI dan Polri. Freeport Indonesia kelihatannya juga telah membayar pihak ketiga untuk biaya perjalanan dan akomodasi para istri perwira dan keluarga, dan juga membayar untuk bermacam-macam biaya rupa-rupa seperti biaya penyelenggaraan acara TNI, bermacam-macam perlengkapan dan perbekalan.

Sampai pertengahan 2003, banyak pembayaran terpisah yang tampaknya dibayarkan kepada TNI dan Polri. Beberapa dari pembayaran ini masing-masing senilai hingga 60,000 dollar AS, walau kebanyakan dari pembayaran tersebut bernilai sekitar 200 hingga 3,000 dollar AS. Beberapa pembayaran kelihatannya telah diberikan kepada institusi pemerintah seperti Kodam Trikora atau unit TNI tertentu. Pembayaran lain kelihatannya telah diberikan kepada beberapa perwira Polri dan TNI secara individu. Sampai pertengahan tahun 2003, banyak anggota TNI dari pangkat jenderal hingga sersan kelihatannya telah menerima pembayaran semacam itu. Setelah pertengahan tahun 2003, Freeport Indonesia kelihatannya telah menghentikan pemberian uang kepada individu (lihat bawah).

Sejak tahun 2000, semakin banyak pembayaran yang tampaknya diberikan kepada para perwira secara individu, bukan kepada institusi pemerintah. Pada bulan Februari 2000 contohnya, seorang mayor TNI-AD kelihatannya telah menerima dua buah pembayaran, yaitu sebesar 13,054 dollar AS dan 1,714 dollar AS. Pembayaran yang pertama dikatakan oleh Freeport Indonesia sebagai uang makan dan yang satu

lagi sebagai uang jasa keamanan. Pada bulan yang sama, uang jasa keamanan kelihatannya juga telah dibayarkan kepada Kodam Trikora (2,285 dollar AS), komandan Kodim (1,344 dollar AS) dan Korem di Sorong (1,143 dollar AS).

Pembayaran sejumlah uang semakin sering dikatakan sebagai uang makan oleh Freeport daripada uang jasa keamanan. Pada bulan Februari 2002 contohnya, sebuah pembayaran sebesar 12,213 dollar AS kelihatannya telah dibayarkan kepada Kolonel Togap Gultom, komandan Kodim di Timika, sementara seorang ajudan Simbolon kelihatannya telah menerima 1,712 dollar AS di bulan yang sama. Kelihatannya dalam kasus ini dan yang lain, pembayaran bulanan terjadi dan terus berlangsung selama setahun atau lebih dan kadang-kadang ditambah dengan pembayaran sekali bayar.

Perwira berpangkat lebih rendah kelihatannya telah menerima pembayaran yang lebih kecil, walaupun ada juga beberapa perkecualian. Antara bulan Maret tahun 2001 dan bulan Maret 2002 contohnya, Freeport Indonesia kelihatannya telah memberi sejumlah uang dengan total 46,000 dollar AS dan sebagian besar disebut sebagai uang makan, kepada Kapten Margus Arifin. Jumlah ini cukup besar, lebih besar dari pada jumlah total yang kelihatannya telah diterima oleh beberapa perwira yang lebih senior.

Perwirayanglainyangkelihatannya telah memanfaatkan bantuan Freeport sebesar-besarnya yaitu Kolonel Mangasa Saragih, yang bertugas sebagai Asisten Intel di Kodam Trikora dan kemudian menjadi Kepala wilayah militer di Sorong. Sejak kedatangannya di Sorong hingga tahun 2002, Saragih kelihatannya telah menerima pembayaran dari Freeport Indonesia sejumlah 40,000 dollar AS untuk biaya makan, dan 4,400 dollar AS untuk biaya jasa keamanan. Sejumlah pembayaran lain kelihatannya juga telah dibayarkan kepada pihak ketiga untuknya, termasuk biaya perjalanan yang jumlahnya lebih dari 4,000 dollar AS dan tagihan hotel hampir sebesar 18,000 dollar AS untuk Kolonel Saragih dan orang-orang yang bepergian dengannya, termasuk istrinya. Global Witness mencoba menghubungi Saragih, yang sekarang menjadi kepala keamanan militer di tambang Freeport, dengan maksud meminta tanggapan darinya. Saragih minta Global Witness untuk menghubunginya lewat markas besar TNI di Jakarta.⁷²

Seperti disebutkan sebelumnya, Global Witness telah menulis surat kepada Panglima TNI, Jendral Endriartono Sutarto, dengan sejumlah pertanyaan termasuk meminta tanggapan beliau atas pembayaran sejumlah uang yang kelihatannya telah diberikan kepada Kolonel Saragih dan perwira lain yang tertulis di laporan ini. Sampai sekarang belum ada balasan untuk surat tersebut.

Dari Individu Ke Institusi?

Di awal tahun 2003, Freeport Indonesia kelihatannya telah mulai merubah cara pembayarannya kepada aparat keamanan. Semakin meningkat, pembayaran dijelaskan sebagai tunjangan hidup atau dana bantuan, bukan uang makan atau jasa keamanan lagi. Salah satu contoh yaitu Kolonel Gultom, komandan Kodim. Tampaknya Gultom telah menerima sejumlah uang dari perusahaan di tahun 2002 sebagai uang makan, tetapi pada bulan Januari 2003 kelihatannya ia telah menerima dua buah pembayaran berjumlah total sedikit dibawah 17,000 dollar AS, yang satu disebut tunjangan hidup dan satu lagi bantuan administrasi. Pada bulan Februari 2003, kelihatannya ia telah menerima dana bantuan bulanan sebesar 14,300 dollar AS.

Pada bulan Maret dan April 2003, ketika Freeport McMoRan sedang menyiapkan pengungkapan mereka kepada SEC, cara pembayaran kelihatannya telah berubah lagi. Tampaknya pembayaran kepada para perwira dilakukan lewat markas TNI setempat, tidak lagi langsung kepada mereka. Dan tampaknya pembayaran sejumlah uang yang ditujukan kepada Simbolon, sekarang sebagai contoh dilakukan melalui komando militer provinsi, dan pembayaran kepada Gultom kelihatannya dilakukan lewat kodim. Begitu juga pembayaran yang dilakukan kepada Kolonel Saragih.

Tampaknya pembayaran yang dilakukan setelah bulan April 2003 tidak lagi langsung diberikan kepada para perwira secara individu. Pada saat itu, Freeport Indonesia kelihatannya telah melakukan pembayaran kira-kira sebesar 16,000 dollar AS sebulannya untuk sebuah batalyon infantri; kemudian 16,000 dollar AS sebulan kepada Kodim; kemudian 13,000 – 15,000 dollar AS sebulan untuk sebuah batalyon Brimob, kira-kira 19,000 dollar AS sebulan untuk polisi setempat, dan 22,000 dollar AS sebulan untuk sebuah pasukan tugas keamanan yang menjaga perusahaan.

Pola ini menimbulkan pertanyaan. Mengapa banyak pembayaran yang kelihatannya telah diberikan kepada individu di kesatuan TNI atau Polri, dan bukan kepada institusi pemerintah? Dan mengapa sistem pembayaran ini kelihatannya diganti pada pertengahan 2003? Global Witness menanyakan kepada Freeport McMoRan apakah setelah bulan Agustus 2002 ada audit, pemeriksaan atau bentuk peninjauan ulang yang lain yang menyebabkan Freeport Indonesia mengubah cara pemberian pembayarannya untuk jasa keamanan. Perusahaan tidak membalas pertanyaan ini.

Membangun Masyarakat Yang Lebih Baik

Freeport McMoRan telah menyatakan kepada SEC bahwa anggaran keamanan Freeport Indonesia, juga termasuk dana untuk program pembangunan masyarakat, tanpa memberikan

rincian atau menjelaskan lebih lanjut mengenai dana ini. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa TNI menjalankan program pembangunan masyarakat dalam upaya membangun image TNI sebagai militer milik rakyat, bekerja untuk kebaikan rakyat Indonesia. Yang tidak jelas adalah apa hubungan pembayaran ini dengan komitmen Freeport McMoRan untuk “memberikan lingkungan kerja yang aman dan stabil bagi 18,000 karyawan tetapnya maupun karyawan kontrak” (lihat boks: Apa yang dikatakan Freeport McMoRan ... dan apa yang tidak dikatakan, halaman 18). Global Witness meminta Freeport untuk mengklarifikasi masalah ini, tetapi perusahaan tidak membalas pertanyaan ini.

Global Witness mempelajari bahwa antara bulan April 1999 dan Desember 2002, Freeport Indonesia kelihatannya telah membayar 342,000 dollar AS kepada TNI untuk program kemasyarakatan. Termasuk sejumlah 68,000 dollar AS yang kelihatannya telah dibayarkan langsung kepada Simbolon di bulan November 2002, dan seperti disebutkan sebelumnya di laporan ini, untuk apa yang disebut proyek kemanusiaan. Sisa uang kelihatannya telah dibayarkan kepada perwira staff di Kodam Trikora. Pembayaran yang sejenis kelihatannya juga telah diberikan kepada Polri. Global Witness menanyakan kepada Freeport McMoRan untuk memberikan bukti bahwa TNI dan Polri telah benar-benar menggunakan uang ini untuk proyek kemasyarakatan disekitar tambang. Perusahaan menolak.

Membayar Pengerahan Polisi?

Pada waktu tertentu Freeport Indonesia tampaknya telah membayar untuk mendatangkan bala bantuan dari kepolisian untuk terbang ke Timika, untuk mengendalikan kerusuhan yang kadang terjadi antara masing-masing kelompok etnis di kota tersebut, yang mana telah menelan lusinan nyawa dalam dekade terakhir. Pada bulan September 1999, Freeport tampaknya telah membayar sebesar 45,725 dollar AS kepada sebuah perusahaan transport udara untuk mencarter sebuah pesawat untuk menerbangkan polisi Brimob. Ada kerusuhan di Timika di akhir bulan September dan hari pertama bulan Oktober 1999 antara etnis Papua dan pendatang dari daerah lain di Indonesia, dimana dilaporkan 14 orang tewas.⁷³ Global Witness tidak mengatakan bahwa Freeport Indonesia bertanggung jawab atas kerusuhan tersebut, hanya kelihatannya perusahaan telah membantu membayar biaya pengeluaran pihak berwenang Indonesia untuk mengatasi mereka.

Tetapi, Freeport dilaporkan enggan untuk dihubungkan dengan tindakan mengusahakan pengangkutan melalui udara ke medan pertempuran kepada TNI. Pada waktu penyerangan yang dilakukan oleh pemberontak Papua di kota Ilaga di bulan Oktober 2001, Simbolon dilaporkan komplain, karena

Freeport tidak mengizinkan helikopternya di gunakan untuk mengangkut bala bantuan, meskipun para pilot Freeport bersedia untuk mengawal helikopter TNI. Untuk menjelaskan keengganan ini, Simbolon menunjuk sebuah insiden lima tahun silam.⁷⁴ Dalam insiden ini, TNI secara kontroversial telah menggunakan sebuah helikopter dengan simbol Palang Merah, untuk melakukan serangan kejutan kepada pemberontak Papua yang sedang menyandera penduduk lokal dan warga negara asing. Perlu juga dicatat bahwa Freeport Indonesia juga telah menyediakan transport udara untuk tujuan kemanusiaan, seperti membawa perbekalan ke daerah-daerah yang terkena bencana alam.

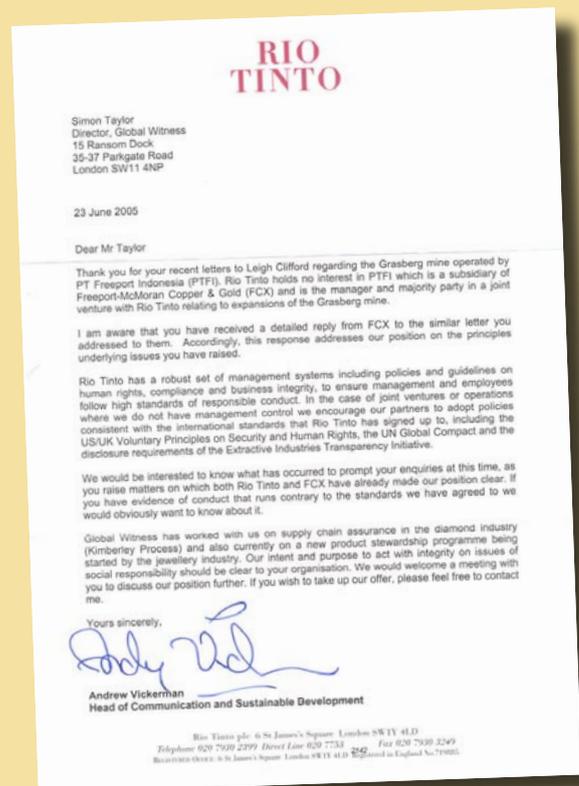
Ada lagi kerusuhan di Timika pada tahun 2003 ketika pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghidupkan kembali kebijakan lama yang sudah lama mati, yaitu rencana memekarkan provinsi Papua menjadi tiga provinsi terpisah. Rencana perubahan perbatasan administrasi ini yang bermaksud untuk menciptakan sebuah provinsi baru yaitu Irian Jaya Barat, dimana kawasan Freeport termasuk didalamnya, dilihat oleh gerakan kemerdekaan sebagai usaha untuk memecah belah orang-orang Papua. Pemimpin daerah setempat yang telah bekerja dengan pihak Indonesia mengusulkan provinsi baru, sementara Tom Beanal, pemimpin pro-kemerdekaan Papua, menentangnya.⁷⁵

Pada bulan Agustus 2003, kerusuhan kembali terjadi di Timika antara mereka yang mendukung dan mereka yang menentang provinsi baru, dimana tujuh orang tewas dalam peristiwa ini. Menurut laporan, Polri mengumumkan pada tanggal 28 Agustus 2003 bahwa mereka sedang mengirimkan dua kompi Brimob untuk mengatasi kerusuhan dan mencari lima orang, termasuk pegawai Departemen Dalam Negeri dan BIN, yang datang dari luar Papua dan dicurigai yang memprovokasi kerusuhan tersebut.⁷⁶ Global Witness mempelajari bahwa Freeport tampaknya telah menanggung biaya untuk membawa polisi-polisi ini ke Timika.

Ringkasnya, Freeport kelihatannya telah membantu membiayai Polri mengatasi kerusuhan yang kelihatannya tidak ada pengaruh langsung bagi perusahaan, dan Polri mencurigai kerusuhan digerakkan oleh orang-orang yang bekerja pada badan pemerintah Indonesian yang lain. Walaupun tidak ada dugaan bahwa Freeport terlibat dalam kerusuhan ini, tetapi insiden ini memperlihatkan sulitnya menarik garis pemisah yang jelas antara kebutuhan keamanan perusahaan yang sah, dengan prioritas lebih besar dari pasukan keamanan di Papua.

Apa yang dikatakan Rio Tinto ...

Global Witness menulis surat kepada Rio Tinto berisi 75 buah pertanyaan detail mengenai hubungan antara Freeport dan aparat keamanan Indonesia, serta peranan Rio Tinto dalam hubungan tersebut. Rio Tinto adalah pemegang saham minoritas di Freeport McMoRan yang memiliki kursi di dewan direktornya sampai tahun 2004, dan juga masih partner kongsi dari Freeport Indonesia. Jawaban dari Rio Tinto adalah sbb:



dan yang tidak dikatakan ...

Tetapi, Rio Tinto tidak menjelaskan:

- Apakah perusahaan bertanggung jawab atas bagian dari pembayaran Freeport Indonesia untuk jasa perlindungan TNI dan Polri.
- Apa peranan eksekutif Rio Tinto, jika ada, dalam memutuskan dan mengawasi pembayaran ini.
- Mengapa perusahaan menyatakan bahwa pembayaran-pembayaran ini "diwajibkan secara hukum" sementara komentar dari Panglima TNI tampaknya mengatakan sebaliknya.

Kesimpulan

Freeport McMoRan memberikan sangat sedikit informasi mengenai hubungan keuangan anak perusahaannya dengan aparat keamanan Indonesia sebelum peristiwa penyerangan bulan Agustus 2002, walaupun pejabat perusahaan katanya telah mendiskusikan kemungkinan untuk melakukan itu. Sejak penyerangan bulan Agustus 2002, dan menindak lanjuti keprihatinan beberapa pemegang saham, perusahaan telah mengeluarkan informasi lebih banyak. Tetapi, perusahaan belum mengeluarkan informasi lebih rinci mengenai hubungannya dengan aparat keamanan, yang mana telah menimbulkan pertanyaan besar.

Freeport McMoRan memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Presiden Soeharto pada saat beliau masih berkuasa, dan transaksi keuangan perusahaan dengan pejabat Soeharto telah menjadi sorotan publik di akhir 90-an, ketika diktator ini jatuh dari tahtanya. Freeport McMoRan tidak di tuntutan atas pelanggaran apapun, tetapi tidak ada keraguan bahwa perusahaan memahami bahwa setiap pembayaran yang dilakukan oleh anak perusahaannya kepada pejabat publik di Indonesia dapat menimbulkan kecurigaan adanya korupsi atau pemerasan. Juga tidak ada keraguan bahwa Freeport McMoRan mengetahui riwayat HAM TNI yang begitu mengerikan, termasuk sejumlah pembunuhan oleh TNI didekat tambang, dimana yang paling terdokumentasi yaitu tahun 1994 – 1995.

Dengan dasar ini, sangat masuk akal untuk mengharapkan bahwa Freeport McMoRan dan anak perusahaannya akan mengambil langkah menyeluruh untuk mencegah tindakan apapun yang dapat membawa perusahaan dituntut terlibat korupsi atau pelanggaran HAM. Oleh karena itu, mengapa, tampaknya sejumlah besar uang telah dibayarkan bukan kepada institusi pemerintah Indonesia, melainkan kepada individu di TNI dan Polri? Dengan adanya resiko yang jelas bahwa pembayaran uang tersebut mungkin akan disalahgunakan atau digunakan untuk tujuan lain, seperti misalnya untuk membiayai operasi membalas pemberontakan, langkah apa saja yang telah diambil oleh Freeport untuk memastikan bahwa uang yang diberikan benar-benar digunakan oleh TNI atau Polri, untuk tujuan seperti yang dinyatakan kepada publik? Dan mengapa kelihatannya Freeport Indonesia menghentikan melakukan pembayaran kepada individu di pertengahan tahun 2003?

Diluar pertanyaan-pertanyaan ini yang berlaku untuk TNI dan Polri secara umum, ada pertanyaan khusus yang berlaku untuk Mahidin Simbolon pada saat ia bertugas di Papua, dilihat dari riwayat karir militernya dan penelitian cermat yang telah dilakukan oleh media internasional dan kelompok HAM. Ia adalah perwira yang menjadi komandan militer di Timor Timur pada

saat penyiksaan oleh tentara adalah hal yang sering terjadi. Ia dikenal sebagai kepala staff daerah komando militer yang pasukannya melakukan tindak kejahatan melawan kemanusiaan di Timor Timur, dan atasan langsungnya pada saat itu telah dituntut atas tindak kejahatan melawan kemanusiaan. Dan ia oleh beberapa sumber diduga memiliki hubungan dengan pimpinan kelompok milisi Timtim, walaupun ia telah membantah dan mengatakan bahwa hubungannya dengan mereka tidak lebih dari kenalan.

Memang benar bahwa Simbolon tidak pernah dituntut atas pelanggaran apapun. Tetapi, benar juga bahwa usaha Indonesia untuk mengadili personil TNI atas tindak kejahatan melawan kemanusiaan di Timor Timur tidak dapat dianggap sebagai hal yang kredibel, karena tidak ada satupun perwira TNI yang dinyatakan bersalah, dan pengadilan itu dianggap cacat oleh antara lain AS dan sebuah tim ahli hukum yang ditunjuk oleh PBB. Atas dasar ini, mengapa tampaknya sejumlah besar pembayaran telah dilakukan oleh Freeport Indonesia, tidak hanya kepada pejabat publik secara individu, tetapi juga kepada seseorang yang memiliki riwayat karir militer yang mengkhawatirkan?

Hubungan keuangan antara Freeport dan TNI menjadi keprihatinan khusus bagi beberapa pemegang saham karena serangan yang membawa maut pada tanggal 31 Agustus 2002 yang menewaskan dua warga negara Amerika Serikat dan seorang warganegara Indonesia. Kecurigaan atas keterlibatan TNI dalam serangan tersebut sampai saat ini tidak terbukti, tetapi hal ini tidak dapat dikesampingkan begitu saja, melihat sejarah TNI dalam menggunakan paramiliter untuk operasi rahasia, yang dapat dibantah, terhadap penduduk sipil serta meluasnya keterlibatan beberapa personil TNI dan Polri dalam korupsi dan kegiatan bisnis ilegal. Kecurigaan-kecurigaan ini perlu diselidiki secara teliti dan obyektif oleh pihak berwenang Indonesia dan AS.

Masalah ini penting bagi para investor di Freeport McMoRan, karena tanpa mengetahui hal yang sebenarnya, tidak mungkin bagi para investor untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai hubungan perusahaan dengan pemerintah Indonesia, untuk memahami posisi yang sebenarnya dari anak perusahaan di Papua, atau untuk menilai sebaik atau seburuk apakah perusahaan mengurangi resiko keamanannya. Lagipula, rakyat Indonesia di Papua dan tempat lain punya hak untuk mengetahui transaksi apapun yang mungkin dilakukan oleh pejabat publik dengan perusahaan swasta asing, dan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi tersebut sesuai dengan hukum.

Global Witness telah memberi kesempatan kepada Freeport

McMoRan untuk memberikan tanggapan atas masalah-masalah yang diangkat oleh laporan ini. Perusahaan telah menjawab dalam istilah umum, dimana hampir seluruh pertanyaan khusus yang diangkat oleh Global Witness dibiarkan tidak terjawab. Rio Tinto juga telah menolak untuk menjelaskan lebih rinci mengenai perannya dalam hubungan keamanan.

Sudah saatnya bagi para penegak hukum di Indonesia dan AS untuk menyelidiki hubungan antara Freeport McMoRan, anak perusahaannya, dan TNI serta Polri. Dalam kasus pembayaran yang tampaknya telah diberikan kepada Mahidin Simbolon dan perwira lain, bukannya kepada institusi negara Indonesia, penyelidikan seharusnya memeriksa pembayaran ini dalam kerangka Undang-Undang Praktek Korupsi Luar Negeri AS dan hukum Indonesia yang mengatur mengenai pembayaran atau pemberian sejumlah uang kepada pejabat publik.

Transparansi Di Daerah Konflik: Keprihatinan Global

Masalah yang dihadapi oleh investasi ekstraktif tidak hanya terbatas pada Indonesia. Sebuah penilaian yang dikeluarkan bulan Maret 2005 berisi 70 negara dimana ada konflik atau resiko konflik: sedikitnya 30 dari negara ini memiliki industri minyak, gas dan pertambangan yang berlimpah.⁷⁷ Sejumlah perusahaan multinasional mendapat kritik atas hubungan mereka dengan aparat keamanan, atau kelompok bersenjata lain.

Yang baru-baru ini terjadi yaitu AngloGold Ashanti. Perusahaan Afrika Selatan ini, yang dikontrol oleh perusahaan konglomerate global Anglo American, mengakui bahwa mereka telah “membuat kesalahan besar” di Republik Demokratik Kongo, setelah Human Rights Watch menerbitkan sebuah laporan di bulan Juni 2005 yang memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut telah memberikan sejumlah uang kepada sebuah kelompok pemberontak yang telah melakukan pembunuhan massal dan pelanggaran HAM lain yang cukup serius. AngloGold Ashanti pada mulanya membantah bahwa mereka telah memberikan bantuan keuangan kepada para pemberontak, tetapi kemudian mengakui bahwa mereka telah memberi uang sekitar 9,000 dollar AS, kebanyakan dibawah “protes dan paksaan”.⁷⁸ Chief Executive perusahaan, Bobby Godsell, mengatakan dibulan Juni 2005 bahwa: “Jika pada akhirnya perusahaan kami hanya dapat beroperasi disana namun dengan membayar uang sogokan, maka kami akan menarik perusahaan kami dari sana. Kedepan, kami tidak akan memberikan bantuan keuangan.”⁷⁹

Orang-orang yang tinggal di daerah dimana konflik bersenjata sedang berlangsung, mempunyai hak untuk diyakinkan bahwa perusahaan yang beroperasi di daerah mereka, tidak memperburuk konflik melalui tindakan mereka. Para

investor ingin melihat bahwa perusahaan mengelola resiko perusahaan dengan baik, yaitu untuk menghindari rusaknya reputasi perusahaan, dan untuk menghindari memperburuk situasi di daerah setempat, yang mungkin mengganggu operasi perusahaan sendiri. Negara tetangga dan masyarakat internasional juga memiliki kepentingan untuk melihat bahwa konflik diselesaikan secara cepat, karena merekalah yang mungkin harus menerima konsekwensinya: jika penggalian sumber alam merupakan salah satu faktor konflik, maka hal itu juga perlu dicari jalan keluarnya jika konflik sedang berusaha diselesaikan. Transparansi penuh dari perusahaan tentang transaksi mereka dengan pihak yang berkonflik, adalah salah satu cara untuk mulai menanggapi keprihatinan semua kelompok.

Kegagalan untuk bersikap transparan, dan menempatkan usaha perlindungan, dapat mendorong sebuah kebudayaan membayar uang sogok, dan membayar uang ‘komisi’ disekitar perusahaan-perusahaan yang mungkin lebih memilih untuk tidak membayar uang sogokan. Sebuah perusahaan dapat dianggap terlibat dalam sebuah tindak kejahatan, di daerah yang tak ada norma hukum, berdasarkan apa yang mereka tahu atau seharusnya tahu, tidak hanya pada apa yang mereka lakukan atau tidak lakukan. Pertanyaan atas keterlibatan oleh perusahaan dalam pelanggaran HAM akan menjadi pekerjaan utama Perwakilan Khusus PBB yang baru untuk Bisnis dan HAM (masih dalam perbincangan pada pertengahan 2005): transparansi penuh oleh perusahaan tidak akan dengan sendirinya memecahkan masalah keterlibatan, tetapi merupakan komponen yang sangat penting dalam setiap pemecahan masalah.

Pertanyaan mengenai pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ekstraktif di daerah konflik diseluruh dunia diliput oleh sebuah inisiatif yang disebut Prinsip Sukarela dalam hal Keamanan dan HAM, yang diluncurkan di tahun 2001 dan disponsori oleh pemerintah AS dan Inggris. Freeport McMoRan dan Rio Tinto telah berulang kali mengutarakan dukungan mereka atas Prinsip Sukarela ini dalam beberapa dokumen publik, termasuk dalam surat jawaban mereka kepada Global Witness atas masalah yang diangkat dalam laporan ini. Perusahaan ekstraktif lain di Indonesia yang juga telah mengutarakan dukungannya termasuk BP dan ExxonMobil.

Prinsip Sukarela menetapkan pedoman untuk perusahaan ekstraktif dalam mengelola pengaruh HAM terhadap operasi mereka. Tetapi sebenarnya pedoman ini cukup lemah dan tidak terlalu spesifik atas pertanyaan-pertanyaan yang diangkat oleh laporan ini. Dalam prinsip tersebut dinyatakan bahwa perusahaan harus “berkonsultasi secara tetap” dengan pemerintah dan masyarakat lokal setempat mengenai

Transparansi Pembayaran Yang Dilakukan Perusahaan Di Indonesia

Langkah pertama yang dapat dilakukan Indonesia untuk menghadapi kemarahan yang diciptakan oleh industri minyak dan tambang di daerah konflik yaitu dengan menjalankan prinsip EITI (Extractive Industries Transparency Initiative). EITI adalah sebuah inisiatif global, yang diluncurkan oleh pemerintah Inggris pada bulan Juni 2003 dan sekarang beranggotakan banyak negara (termasuk Nigeria, Azerbaijan, Timor Leste, dll) dan perusahaan multinasional terkemuka yang beroperasi di Indonesia, termasuk BP dan ExxonMobil. Prinsip ini mempromosikan diumumkannya secara publik aliran pemasukan dari perusahaan ekstraktif kepada pemerintah, dengan audit dan mekanisme pengawasan, jadi rakyat dapat merasa yakin bahwa pemasukan ini tidak disalahgunakan.

Indonesia dapat memakai prinsip EITI untuk menciptakan program reformasi mereka sendiri untuk memperlihatkan aliran pemasukan dari industri ke pemerintah pusat, dan dari pemerintah ke daerah yang menghasilkan sumber alam tersebut. Hal ini dapat membantu menghilangkan kebencian yang terjadi di Aceh dan Papua, bahwa penduduk setempat hanya menerima sedikit sekali dari sumber alam mereka yang diambil oleh perusahaan ekstraktif, kebencian yang telah memanaskan konflik di kedua tempat.

Namun, dengan bergabung dengan EITI tidak serta merta akan memecahkan masalah tertentu yang diangkat oleh laporan ini. Jika dilihat dari standar EITI, Freeport McMoRan sudah cukup transparan, sepanjang perusahaan telah memperlihatkan total nilai pajak dan pembayaran lain yang diberikan kepada pemerintah Indonesia, serta total pembayaran yang diberikan kepada aparat keamanan. Masalahnya, seperti yang telah diperlihatkan oleh laporan ini, adalah mencari tahu arti sebenarnya dari informasi yang diungkapkan ini.

Indonesia berencana untuk menjadi lebih transparan kepada publik dalam hal keuangan TNI dan Polri. Reformasi ini disambut baik sekali, karena dalam sebuah demokrasi, aparat keamanan seharusnya tidak boleh mempunyai akses ke sumber dana diluar anggaran pemerintah yang tidak dibawah kontrol pemerintahan sipil. Tetapi reformasi memerlukan waktu. Sementara itu, Indonesia dapat mengeluarkan sebuah undang-undang, peraturan atau keputusan pemerintah yang mewajibkan perusahaan memperlihatkan secara penuh semua pembayaran yang diberikan kepada TNI dan Polri, serta diaudit secara independen.

Kejadian belakangan memperlihatkan bahwa perusahaan-perusahaan ekstraktif di daerah konflik di Indonesia dapat lebih transparan mengenai transaksi mereka dengan aparat keamanan, dan dapat meninggalkan cara lama yang menempatkan garnisun TNI atau Polri dalam jumlah besar di lokasi proyek. BP, sebuah perusahaan minyak, telah sepakat dengan pihak berwenang Indonesia mengenai pengaturan keamanannya untuk proyek gas Tangguh LNG di Papua bagian Barat, dimana harus lebih transparan dan membatasi peranan TNI dan Polri dalam memberikan jasa keamanan sehari-hari.

BP telah sepakat dengan pemerintah bahwa tidak ada satu tentaraupun yang akan ditempatkan di lokasi Tangguh LNG, dan hanya sejumlah kecil polisi. BP mengatakan mereka akan menanggung biaya transport dan tunjangan hidup aparat keamanan: hal ini sesuai dengan tabel belanja pemerintah, dan biaya ini dibayarkan kepada Badan Pelaksana Migas, badan yang mengatur industri gas dan minyak, jadi tidak langsung kepada aparat keamanan. BP telah berjanji untuk mengumumkan seluruh pembayaran semacam itu kepada publik.¹ BP juga seharusnya sepakat bahwa seluruh pembayaran ini akan diaudit secara independen dan hasil audit diumumkan kepada publik secara penuh, untuk memperlihatkan bahwa pembayaran tidak disalahgunakan. BP sedang menetapkan sebuah standar baru, dan harus bersiap untuk diuji coba.

Situasi keamanan di lokasi Tangguh LNG pada awalnya akan menjadi tanggung jawab Polri dan akan bergantung pada penetapan yang diatur antara proyek dengan masyarakat lokal, dimana tentara hanya akan dikirim apabila ada masalah keamanan yang tidak dapat diatasi oleh staf proyek dan polisi. BP mengatakan kehadiran polisi di daerah Teluk Bintuni dimana proyek berlokasi, akan diperbesar dari 34 polisi menjadi 90 bersamaan dengan berjalannya pembangunan, dan delapan atau sembilan prajurit yang sudah ada di kota Babo yang dekat dengan lokasi, tidak akan ditambah.² Jika rencana ini dilaksanakan, jumlah kehadiran pasukan keamanan disekitar Tangguh LNG akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan disekitar tambang Freeport.

Karena pada pertengahan 2005, pekerjaan pembangunan di Tangguh LNG belum mulai, susunan keamanan BP masih belum dapat diuji. Beberapa pengamat khawatir bahwa TNI akan menolak rencana ini atau malah merekayasa kerusuhan di lokasi proyek, untuk menjadi pembenaran untuk mengerahkan sebuah garnisun disana, dan meminta perusahaan membayar jasa keamanan.

Kehadiran TNI di daerah yang lebih luas di sekitar Tangguh LNG kelihatannya akan bertambah: pada bulan Maret 2005 TNI-AD mengumumkan rencananya untuk menugaskan 15,000 tentara di Papua dalam empat tahun kedepan, dan 5,000 dari tentara ini akan ditempatkan di Sorong, yaitu sekitar 300 km dari lokasi proyek. Pada bulan Maret 2005, seorang juru bicara TNI-AD mengatakan bahwa penugasan itu “bukan sebuah proyek yang tidak mahal, dan akan dilaksanakan sesuai dengan anggaran kami.”³

Meskipun jika BP dapat menghindari pihak TNI menjadi terlibat dalam proyek, Polri juga memiliki reputasi korupsi dan pelanggaran HAM, yang berarti tidak adanya TNI bukan berarti tidak adanya resiko. Aktivis HAM menyebutkan bahwa Kapolda Papua dengan siapa BP menandatangani perjanjian keamanan pada bulan April 2004, yaitu Timbul Silaen, adalah kepala polisi di Timor Timur tahun 1999 dan telah didakwa atas tindak kejahatan

melawan kemanusiaan.⁴

Apa yang dialami BP memberi kesan, sedikitnya secara teori, bahwa di Indonesia yang semakin lama semakin terbuka dan demokratis, tidak ada alasan untuk tetap menerapkan praktek keamanan yang sudah usang, yang mana telah menimbulkan kecurigaan besar dan tidak baik bagi reputasi perusahaan. TNI dan Polri harus menerima dana mereka dari pemerintah mereka sendiri, melalui anggaran nasional, bukan dari perusahaan swasta, karena ini satu-satunya cara untuk memastikan bahwa keuangan mereka dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat Indonesia. Sampai perubahan itu dilaksanakan, perusahaan swasta yang melakukan pembayaran kepada aparat keamanan Indonesia harus diwajibkan secara hukum atau peraturan, untuk mempublikasikan secara penuh apa yang mereka bayar.

pengaturan keamanan mereka, kemudian menjelaskan kebijakan mereka dalam perilaku etis dan HAM, dan “mengutarakan keinginan mereka” bahwa pasukan keamanan pemerintah benar-benar melaksanakan tugas mereka dengan cara yang konsisten dengan kebijakan ini. Perusahaan juga harus “mendorong” pemerintah mempublikasikan informasi yang terperinci mengenai penetapan jasa keamanan mereka, “tergantung pada masalah keselamatan dan keamanan yang lebih penting,” dan diharapkan “mengenal komitmen untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku di negara setempat”. Perusahaan harus “menggunkan pengaruh mereka” untuk mempromosikan prinsip bahwa “orang-orang yang terlibat pelanggaran HAM tidak dapat memberikan jasa keamanan kepada perusahaan.”

Jadi, tampaknya sebuah perusahaan dapat mendukung Prinsip Sukarela, dan mendapatkan keuntungan reputasi, tanpa memberikan informasi kepada publik mengenai pembayaran yang diberikan perusahaan kepada pihak bersenjata yang terlibat dalam konflik.

Tidak ada ketentuan mengenai langkah pengawasan yang independen atas pembayaran semacam itu, dan kelihatannya tidak ada mekanisme resmi untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang mendukung Prinsip Sukarela benar-benar menerapkan prinsip tersebut.

Sekalipun Prinsip Sukarela diubah, untuk memastikan bahwa perusahaan benar-benar memberikan informasi yang cukup detail mengenai pembayaran-pembayaran ini, masih ada masalah yang melekat dari proses yang tidak mengikat, yaitu: pemerintah atau perusahaan yang tidak ingin terikat oleh

Prinsip tersebut dapat dengan mudah menolak ikut serta, atau dapat ikut serta namun hanya secara retorik tanpa harus dipaksa untuk melaksanakannya. Dan karena perjanjian sukarela tidak memiliki kekuatan hukum, perusahaan juga dapat menyatakan bahwa mereka mendukung prinsip transparansi, namun sambil menunjuk hukum yang berlaku di negara dimana perusahaan mereka beroperasi – yang berhubungan dengan rahasia perusahaan atau keamanan nasional, contohnya – dijadikan alasan untuk tidak mengeluarkan informasi yang lebih terperinci.

Sudah jelas bahwa pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan di daerah konflik sangat penting bagi para investor, yang berarti para investor tidak bisa mendapatkan gambaran yang sebenarnya mengenai sebuah perusahaan tanpa mengetahui apa yang dibayarkan oleh perusahaan dan kepada siapa, untuk tujuan apa dan dibawah langkah pengawasan seperti apa. Dan juga jelas bahwa penduduk yang tinggal di daerah konflik juga harus dapat mengetahui mengenai pembayaran ini. Untuk mengatasi masalah pendekatan sukarela, dan untuk memastikan bahwa semua perusahaan ekstraktif di daerah konflik berada dibawah kewajiban yang setara untuk mengumumkan pembayaran yang berhubungan dengan jasa keamanan, mungkin tidak ada alternatif lain selain mewajibkan laporan semacam itu secara hukum di negara dimana perusahaan tersebut berada dan beroperasi, atau melalui peraturan yang mengikat dengan jangkauan yang luas, seperti standar akunting internasional.

Di daerah konflik dimana hukum lemah dan orang dapat dibunuh, diperkosa atau disiksa adalah hal yang biasa, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk menutupi aspek apapun dari pembayaran mereka kepada pihak manapun dalam konflik.

Referensi

- ¹ United States District Court for the District of Columbia. 16th June 2004. Grand Jury indictment of Anthonius Wamang.
- ² ABC Foreign Correspondent. 1st September 2004. West Papua – ambushed. (Transcript).
- ³ Shareholder proposal by New York City Employees Retirement System and New York City Teachers Retirement System for annual general meeting of May 2003.
- ⁴ *Ibid.*
- ⁵ Jones, Walker, Waechter, Poitevent, Carrere and Denegre LLP. 3rd March 2003. Letter to the US Securities and Exchange Commission.
- ⁶ The City of New York. Office of the Comptroller. 4th March 2003. Letter to the US Securities and Exchange Commission.
- ⁷ Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. 10-K filing to the Securities and Exchange Commission for the fiscal year ended 31st December 2002.
- ⁸ *Ibid.*
- ⁹ International Crisis Group. Indonesia: Keeping the military under control. Jakarta/Brussels, 5th September 2000. Page 16.
- ¹⁰ Global Witness telephone interview with Simbolon. 26th June 2005.
- ¹¹ Amnesty International. The September and October 1995 riots: arbitrary detention and torture. London, January 1996.
- ¹² Far Eastern Economic Review. 2nd September 1999. East Timor is about to vote: so is Indonesia's military letting go?
- ¹³ Global Witness telephone interview with Simbolon. 26th June 2005.
- ¹⁴ International Crisis Group. 1st March 2005. Crisiswatch No 19.
- ¹⁵ CIA World Factbook. East Timor.
- ¹⁶ Transparency International. 25th March 2004. Plundering politicians and bribing multinationals undermine economic development, says TI.
- ¹⁷ World Bank. Indonesia Country Assistance Strategy 2004-2007.
- ¹⁸ International Crisis Group. 20th December 2004. Indonesia: rethinking internal security strategy. Page 2.
- ¹⁹ Environmental Investigation Agency/Telapak. The last frontier: illegal logging in Papua and China's massive timber theft. London/Jakarta, February 2005. Page 7.
- ²⁰ Jakarta Post. 19th March 2005. Army to station an extra division in Papua.
- ²¹ Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. 2003 annual report. Page 12.
- ²² George A. Mealey, Grasberg, Mining the richest and most remote deposit of copper and gold in the world in the mountains of Irian Jaya, Indonesia. Freeport McMoran Copper & Gold Inc, 1996. Page 299.
- ²³ *Ibid.* Page 304
- ²⁴ Robin Osborne. Indonesia's secret war: the guerrilla struggle in Irian Jaya. Sydney, 1985. Page 120.
- ²⁵ Tapol. West Papua: the obliteration of a people. Tapol. 1983. Pages 38-40.
- ²⁶ George A. Mealey, Grasberg, Mining the richest and most remote deposit of copper and gold in the world in the mountains of Irian Jaya, Indonesia. Freeport McMoran Copper & Gold Inc, 1996. Page 306.
- ²⁷ Freeport McMoRan Copper & Gold. 2003 annual report. Page 48. Note 2.
- ²⁸ Wall Street Journal. 29th September 1998. Hand in glove: how Suharto's circle, mining firm, did so well together.
- ²⁹ Denise Leith. The politics of power: Freeport in Suharto's Indonesia. University of Hawaii Press, 2003. Page 68.
- ³⁰ Agence France Presse. 5th November 1998. US miner chairman denies allegations of corruption in Freeport Indonesia.
- ³¹ International Crisis Group. Resources and conflict in Papua. Jakarta/Brussels, 13th September 2002. Page 19.
- ³² *Ibid.* Page 19. Also Denise Leith. The politics of power: Freeport in Suharto's Indonesia. University of Hawaii Press, 2003. Page 243.
- ³³ Jakarta Post. 16th March 2003. Freeport confirms allowances for military, police in Papua.
- ³⁴ Lesley McCulloch. Trifungsi: the role of the Indonesian military in business. Paper delivered to the International Conference on Soldiers in Business. Jakarta, 17-19 October 2000.
- ³⁵ Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. Provision of Security. From web version of 2002 Working Towards Sustainable Development report at www.fc.com.
- ³⁶ Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. 10-K filing to the Securities and Exchange Commission for the year ending 31st December 2002.
- ³⁷ This event was reported via the Internet and confirmed at the time by a source close to Freeport.
- ³⁸ Global Witness telephone interviews with Reverend Lowry. June 2005.
- ³⁹ Shareholder proposal by New York City Employees Retirement System and New York City Teachers Retirement System.
- ⁴⁰ *Ibid.*
- ⁴¹ *Ibid.*
- ⁴² Jones, Walker, Waechter, Poitevent, Carrere and Denegre LLP. 3rd January 2003. Letter to US Securities and Exchange Commission.
- ⁴³ *Ibid.*
- ⁴⁴ Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. Working towards sustainable development. 2001 Economic, Social and Environmental Report. Page 1.
- ⁴⁵ *Ibid.* Page 8.
- ⁴⁶ Jones, Walker, Waechter, Poitevent, Carrere and Denegre LLP. 3rd March 2003. Letter to the US Securities and Exchange Commission. Page 2.
- ⁴⁷ Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. 6th February 2003. Offering Memorandum for 7% convertible senior notes due 2011. Security Matters.
- ⁴⁸ Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. 10-K filing to the Securities and Exchange Commission for the fiscal year ended 31st December 2002.
- ⁴⁹ American Metal Market. 18th March 2003. Freeport admits paying military for protection.
- ⁵⁰ The City of New York. Office of the Comptroller. 27th February 2003. Letter to the US Securities and Exchange Commission.
- ⁵¹ *Ibid.*
- ⁵² Jones, Walker, Waechter, Poitevent, Carrere and Denegre LLP. Letter to the US Securities and Exchange Commission. 3rd March 2003.
- ⁵³ *Ibid.*
- ⁵⁴ The City of New York. Office of the Comptroller. 4th March 2003. Letter to the US Securities and Exchange Commission.
- ⁵⁵ *Ibid.*
- ⁵⁶ *Ibid.*
- ⁵⁷ Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. Report on the Annual Meeting of Stockholders of Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, held on 6th May 2004. At www.fc.com.
- ⁵⁸ Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. Report on the annual meeting of stockholders of Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, held on 5th May 2005. At www.fc.com.
- ⁵⁹ Rio Tinto. 1st December 2004. Grasberg. Statement at www.riotinto.com/media
- ⁶⁰ Detikcom. 20th March 2003. Panglima: TNI tak perintahkan Freeport beri dana keamanan.
- ⁶¹ Jakarta Post. 20 March 2003. TNI's Credibility.
- ⁶² Koran Tempo. Freeport Hires TNI.
- ⁶³ Jakarta Post. 23rd June 2005. BIN involved in killing Munir: team.
- ⁶⁴ Antara News Agency. 14th March 2003 TNI to ask clarification from Freeport Indonesia.
- ⁶⁵ Antara News Agency. 20th March 2003. Investors not obliged to pay "security fees" to Indonesian military, commander says.
- ⁶⁶ Detikcom. 20th March 2003. Panglima: TNI tak perintahkan Freeport beri dana keamanan.
- ⁶⁷ Sinar Harapan. 18th March 2003. KSAD: Pasukan TNI tidak ditarik dari PT Freeport.
- ⁶⁸ *Ibid.*
- ⁶⁹ Sinar Harapan. 3rd March 2003. Pangdam Trikora: Freeport agar terbuka soal dana kepada TNI.
- ⁷⁰ Global Witness telephone interview with Simbolon. 26th June 2005.
- ⁷¹ International Crisis Group. Indonesia: Keeping the military under control. Jakarta/Brussels, 5th September 2000. Page 16.
- ⁷² Global Witness telephone interview with Saragih. June 2005.
- ⁷³ Agence France Presse. 1st October 1999. Irian Jaya clashes leave 14 dead.
- ⁷⁴ Jakarta Post. 1st October 2001. Military moves to retake Ilaga from separatists.
- ⁷⁵ International Crisis Group. Dividing Papua: How Not to Do It. Jakarta/Brussels, 9th April 2004. Page 12.
- ⁷⁶ Kompas. 28th August 2003. Pemekaran wilayah di provinsi Papua ditunda.
- ⁷⁷ International Crisis Group. 1st March 2005. Crisiswatch No 19.
- ⁷⁸ Human Rights Watch. The Curse of Gold. New York, 2nd June 2005.
- ⁷⁹ Mail and Guardian. 2nd June 2005. Anglo "messed up" in the DRC.
- ⁸⁰ Securities and Exchange Commission. 5th March 2003. Response of the Office of Chief Counsel Division of Corporation Finance.

Referensi untuk buku: Serangan bulan Agustus 2002

- ¹ Jakarta Post. 5th September 2002. TNI spokesman names leader of Freeport attack.
- ² Institute for Human Rights Study and Advocacy (Elsham). What's wrong with Freeport's security policy? Elsham, 21st October 2002.
- ³ Congressman Joel Hefley of Colorado. Extensions of Remarks. 16th March 2004. Prevent Indonesia from receiving IMET funding in fiscal year 2004.
- ⁴ Jakarta Post. 2nd April 2004. Key witness in Freeport changes story.
- ⁵ Suara Pembaruan. 10th January 2003. Tim Gabungan TNI dan Polri: anggota TNI tidak terlibat penembakan di Timika.
- ⁶ Sydney Morning Herald. 2nd November 2002. Kopassus accused of Freeport ambush.
- ⁷ Washington Post. 27th February 2003. Involvement of Indonesian military. Post Corrects Nov. 3 Report on Freeport Mine Ambush.
- ⁸ New York Times. 30th January 2003. US links Indonesian troops to deaths of two Americans.
- ⁹ US Embassy Jakarta. Press release. 31st January 2003.
- ¹⁰ New York Times. 5th February 2003. Soldier strangled Papua separatist.
- ¹¹ Global Witness telephone interview with Daley. June 2005
- ¹² Congressman Joel Hefley of Colorado. 15th July 2003. Statement of the Honorable Joel Hefley. Amendment to HR 1950.
- ¹³ Associated Press. 4th March 2004. Indonesian officials suspected in attack.
- ¹⁴ Global Witness telephone interview with Slobodan Lekic of AP. June 2005.
- ¹⁵ United States District Court for the District of Columbia. Grand Jury indictment of Anthonius Wamang. 16th June 2004.
- ¹⁶ ABC Foreign Correspondent. 1st September 2004. West Papua – ambushed. Transcript.
- ¹⁷ US State Department. Press roundtable in Indonesia. 7th May 2005.

Referensi untuk buku: Mahidin Simbolon di Timor Timur dan Papua

- ¹ Tempo Magazine. 28th November 1997. Will Maj-Gen Prabowo become chief of the army strategic command reserve? Translated by FBIS news service.
- ² Tapol. 16th June 1999. The dismissal and indictment of TNI officers for human rights violations in East Timor.
- ³ Amnesty International. January 1996. The September and October 1995 riots: arbitrary detention and torture.
- ⁴ Unpublished report by independent expert commissioned by Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. East Timor 1999. Crimes Against Humanity. Page 40.
- ⁵ Australian Broadcasting Corporation. 15th March 1999. Four Corners. A Licence to Kill. Transcript.
- ⁶ Sydney Morning Herald. 14 March 2002. Silence over a crime against humanity.
- ⁷ Global Witness telephone interview with Simbolon. 26th June 2005.
- ⁸ Radiotelevisao Portuguesa. 6th August 1999. Interview with Xanana Gusmao.
- ⁹ Agence France Presse. 5th August 1999. E. Timorese seeks international arrest warrants for Indonesia generals. NB. This report wrongly identifies Simbolon as a colonel. He was in fact a brigadier-general.
- ¹⁰ Far Eastern Economic Review. 2nd September 1999. East Timor is about to vote: so is Indonesia's military letting go?
- ¹¹ Jane's Intelligence Review. 1st November 2000. East Timor: can it stand alone?
- ¹² Media Indonesia. 4th December 2003. Aparat hentikan kegiatan Guterres di Timika.
- ¹³ US State Department. 9th August 2004. Daily Press Briefing. Transcript.
- ¹⁴ District Court of Dili before the Special Panel for Serious Crimes. 24th February 2003. Indictment against Wiranto, Zacky Anwar Makarim, Kiki Syahnakri, Adam Rachmat Damiri, Suhartono Suratman, Mohammad Noer Muis, Yayat Sudrajat and Abilio Jose Osorio Soares.
- ¹⁵ Human Rights Watch. 7th August 2004. Indonesia: courts sanction impunity for East Timor abuses.
- ¹⁶ Unpublished report by independent expert commissioned by Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. East Timor 1999: Crimes against humanity. Page 252.
- ¹⁷ Detikcom. 12th November 2001. Indonesia: Police, military differ over cause of Papuan figure's death. Translated by FBIS news service.
- ¹⁸ ABC Radio Australia news. 21st April 2003. Soldiers jailed for murder of Papuan activist.
- ¹⁹ Tempo Interactive. 30th March 2002. Trikora Military Chief Denies Any Responsibility in They's Murder.
- ²⁰ Global Witness telephone interview with Simbolon. 26th June 2005.
- ²¹ Laksamana.net. 4th February 2003. Papua military chief loses job after murders.

Referensi untuk buku: Transparansi pembayaran yang dilakukan perusahaan di Indonesia.

- ¹ Letter from BP to Global Witness. 25th February 2005.
- ² *Ibid.*
- ³ Jakarta Post. 19th March 2005. Army to station extra division in Papua.
- ⁴ Tapol. 20th June 2005. BP denounced for security pact with East Timor crimes suspect.



global witness

Global Witness Publishing Inc.
8th Floor, 1120 19th Street NW
Washington Dc 20036
e-mail: oil@globalwitness.org
<http://www.globalwitness.org>